

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR SECARA BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BULUKUMBA**

(Studi Kasus Masyarakat Penerima Program Penyediaan Air Minum - PAMSIMAS)

**COMMUNITY PARTICIPATION IN SUSTAINABLE WATER RESOURCE IN BULUKUMBA
(CASE STUDY RECEIVING COMMUNITY WATER SUPPLY - PAMSIMAS)**

ANDI TENRIWARUWATY



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

TESIS

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA
AIR SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

(Studi Kasus Masyarakat Penerima Program Penyediaan Air Minum-PAMSIMAS)

Disusun dan diajukan Oleh

ANDI TENRIAWARUWATY

Nomor Pokok P0303209006

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 13 Juni 2013

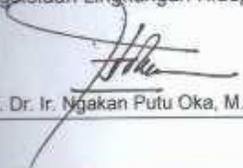
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat,

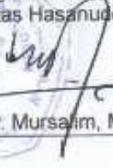

Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S
Ketua


Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S
Anggota

Ketua Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup


Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Ir. Mursahim, M.Sc

Abstrak

ANDI TENRIAWARUWATY. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Secara Berkelanjutan Di Kabupaten Bulukumba (dibimbing oleh Didi Rukmana, Darmawan Salman).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba, faktor-faktor yang berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba.

Pengumpulan data menggunakan teknik kuantitatif yakni dengan cara pemberian kuisioner kepada sejumlah masyarakat di dua lokasi yakni desa Mattoanging kecamatan Kajang dan kelurahan Sapolohe kecamatan Bontobahari kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan di desa Mattoanging termasuk tingkat partisipasi *Placation*, pada perencanaan dan evaluasi tergolong rendah, pada monitoring dan menerima manfaat cukup tinggi, dan tinggi, sedang untuk kelurahan Sapolohe jauh lebih baik dari desa Mattoanging, pada perencanaan cukup tinggi; pada pelaksanaan, penerima manfaat, monitoring, dan evaluasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat yakni pekerjaan, umur, lama tinggal, sedang jenis kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan kurang signifikan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya air



ABSTRACT

ANDI TENRIAWARUWATY. *Community Participation in Sustainable Water Resource Management In Bulukumba* (supervised by Didi Rukmana, Darmawan Salman)

The purpose of this study to find out: a form of community participation in the management of water resources in a sustainable Bulukumba, the factors that influence the community participation in the management of water resources in a sustainable Bulukumba.

The data were collected by using quantitative technique. Questionnaires were distributed to a number of community members in two villages namely location Mattoanging Kajang district and sub district Sapolohe Bontobahari Bulukumba district.

The results reveal that in the sustainable management of water resources in the village of *placation* Mattoanging including participation rates, in the planning and evaluation is low, the monitoring and receiving benefits is quite high, and high, moderate to sub Sapolohe much better than Mattoanging village, at high enough planning: in the implementation, beneficiaries, monitoring, and evaluation of community participation in sustainable management of water resources high. The factors that influence the community participation occupation, age, length of stay, were gender, education level, income less significant impact on community participation

Keywords: community participation, water resources management



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya atas tersusunnya tesis ini. Penelitian dan penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat sarjana S-2 dalam program studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam penyusunan tesis ini, penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya antara lain kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Asisten Direktur I, Asisten Direktur II dan Asisten Direktur III karena dibawah kepemimpinan mereka kami mendapatkan banyak kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Bapak **Prof.Dr.Ir.Darmawan Salman**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Panitia Penilai-Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini serta memberikan petunjuk, koreksi dan kritik yang berharga bagi penyempurnaannya.
5. Bapak Nurdin, selaku Tokoh Masyarakat Desa Mattoanging Kec. Kajang Kab. Bulukumba dan Bapak Mudatsir Tokoh Pemuda Kel. Sapolohe Kec.

Bonto Bahari Kab. Bulukumba yang telah membantu dan memberikan petunjuk dan data-data kepada penulis.

6. Saudariku Ir. Andi Marliniwaty, MM, dan Ir. Andi Kurniawaty, SS, MM serta saudara-saudaraku lainnya yang ikut berperan, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan dorongan semangat yang sangat berarti bagi penulis.
7. Mamaku tersayang dan tercinta yang selalu mendukung segalanya dan tak kenal lelah berdoa untuk keberhasilan anakmu ini.
8. Kanda Anwar Parenrengi, SE yang senantiasa selalu memberikan semangat, dukungan dan pendampingan yang tak kenal lelah.
9. Saudara-saudaraku seorganisasi di MAPALA UMI dan Korps Suka-Rela (KSR-BSM UMI) yang selalu memberikan bantuan dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan untuk itu mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penyusunannya. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, Mei 2013

A.TENRIAWARUWATY

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRACK.....	iv
ABSTRAK.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Gambaran Umum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	11
1. Defenisi dan Sumber Daya Air.....	13
2. Pengelolaan Sumber Daya Air	14

3. Manfaat Pengelolaan Sumber Daya Air	16
4. Penyalahgunaan Sumber Daya Air dan Akibatnya.....	21
5. Dampak Pencemaran Sumber Daya Air Terhadap Lingkungan ...	26
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	29
1. Defenisi Partisipasi Masyarakat	29
2. Jenis Partisipasi Masyarakat	32
3. Partisipasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	37
3.1 Tingkatan Partisipasi Masyarakat	44
3.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat	48
3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	50
C. Program Nasional WSLIC-III/PAMSIMAS	53
D. Kerangka Pikir	58
E. Defenisi Operasional	61
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	64
B. Jenis Dan Sumber Data	64
C. Populasi dan Sample	65
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	68
E. Metode Analisa Data	69
BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	76
A. DESA MATTOANGING	76

B. KELURAHAN SAPOLOHE	78
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	81
A. Gambaran Umum Program	81
B. Karakteristik Responden	86
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Berkelanjutan	101
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	166
A. Kesimpulan	166
B. Saran	168
DAFTAR PUSTAKA	169

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1 Kinerja Capaian KPI Pamsimas	58
Tabel 2 Penentuan Skor Pada Tingkatan Partisipasi	73
Tabel 3 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin di Ddesa Mattoanging	87
Tabel4 Distribusi Responden Menurut Pekerjaan di Desa Mattoanging	88
Tabel 5 Distribusi Responden Menurut Penghasilan di Desa Mattoanging	89
Tabel 6 Distribusi Responden Menurut Umur di Desa Mattoanging	90
Tabel 7 Distribusi Responden Menurut Lamanya Tinggal di Desa Mattoanging	91
Tabel 8 Distribusi Responden Menurut Pendidikan di Desa Mattoanging....	92
Tabel 9 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Sapolohe	94
Tabel 10 Distribusi Responden Menurut Pekerjaan di Kelurahan Sapolohe	95
Tabel 11 Distribusi Responden Menurut Penghasilan di Kelurahan Sapolohe	96
Tabel 12 Distribusi Responden Menurut Umur di Kelurahan Sapolohe.....	97
Tabel 13 Distribusi Responden Menurut Lamanya Tinggal di Kelurahan Sapolohe	98
Tabel 14 Distribusi Responden Menurut Pendidikan di Kelurahan Sapolohe	99
Tabel 15 Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Mattoanging	102
Tabel 16 Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kelurahan Sapolohe	106

Nomor	Halaman
Tabel 17 Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Minum di Desa Mattoanging	114
Tabel 18 Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Minum di Desa Mattoanging	116
Tabel 19 Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penerima Manfaat Pengelolaan Penyediaan Sarana Air minum di Desa Mattoanging	118
Tabel 20 Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Minum di Desa Mattoanging	119
Tabel 21 Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Minum di Desa Mattoanging.....	121
Tabel 22 Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Minum di Kelurahan Sapolohe	123
Tabel 23 Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Minum di Kelurahan Sapolohe.....	125
Tabel 24 Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penerima Manfaat Pengelolaan Penyediaansarana Air Minum di Kelurahan Sapolohe..	127
Tabel 25 Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Minum di Kelurahan Sapolohe.....	129
Tabel 26 Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Mminum di Kelurahan Sapolohe.....	130

Nomor	Halaman
Tabel 27 Analisis Regresi Ganda Linear Faktor Eksternal Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Mattoanging.....	131
Tabel 28 Analisis Regresi Ganda Linear Faktor Internal Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Mattoanging.....	. 133
Tabel 29 Analisis Regresi Ganda Linear Faktor Eksternal Terhadap Partisipasi Masyarakat Kelurahan Sapolohe.....	141
Tabel 30 Analisis Regresi Ganda Linear Faktor Internal Terhadap Partisipasi Masyarakat Kelurahan Sapolohe.....	143

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1	47
2	60

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Peta Lokasi Penelitian.....	174
2. Peta Lokasi Penelitian.....	175
3. Foto Lokasi Penelitian.....	176

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air minum merupakan faktor yang terkait dengan perilaku atau gaya hidup masyarakat serta turut menentukan tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan seseorang akan mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas kerja, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraannya.

Sektor air minum merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum, khususnya di perdesaan dan daerah pinggiran kota (peri-urban) berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga.

Penyediaan prasarana dan sarana air minum yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum yang baik. Ketiga dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat.

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang memiliki sifat terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan

manusia. Keterbatasan kualitas air adalah mutu air yang tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi manusia. Penggunaan air yang tidak layak tersebut untuk berbagai keperluan manusia dapat menimbulkan dampak negatif pada tingkat kesehatan. Konsumsi air yang tidak memenuhi standar kesehatan telah memunculkan berbagai penyakit yang berbahaya antara lain kolera, diare, gizi buruk, serta berbagai penyakit lain yang mempengaruhi mental dan fisik manusia (Gleick, 2000). Rendahnya kualitas air merupakan masalah yang serius, namun ternyata terdapat juga masalah berupa distribusi sumber air yang tidak merata. Terdapat daerah yang relatif kaya akan sumber air, namun terdapat juga daerah yang kekurangan sumber air, bahkan tidak memiliki sumber air sama sekali.

Tentunya kondisi kurangnya sumber daya air yang dapat dimanfaatkan memerlukan sebuah pengelolaan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan akan air bersih. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih ini seringkali tidak hanya dihadapkan pada kurangnya sumber air yang dapat dieksploitasi, namun juga kurangnya sumber daya lainnya, seperti modal dan sumber daya manusia yang tidak mendukung upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Pada daerah yang miskin dan jauh dari pusat pelayanan publik, kurangnya sumber air menjadi masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan. Pembangunan infrastruktur penunjang upaya pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan investasi yang sangat tidak menguntungkan

bagi sektor privat untuk dapat mengambil bagian, karena tingkat pengembalian investasi yang sudah dilakukan sangat kecil. Terlebih lagi ketika masyarakat memandang air lebih kepada fungsi sosialnya, bukan kepada fungsi ekonomi.

Sedangkan bagi pemerintah, untuk melakukan investasi pada sektor ini di daerah yang jauh dari pusat pelayanan seringkali dihadapkan pada keterbatasan anggaran, sehingga daerah yang demikian ini tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan tidak tercapainya permintaan rata-rata perkapita di Indonesia 125 s/d 150 l/org/hari (Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi, Departemen KIMPRASWIL, 2004) bahkan untuk mencapai standar kebutuhan minimum untuk hidup (*basic water requirement*) sebesar 50 l/org/hari (Gleick, 2000) sulit untuk dilakukan.

Kompetisi penggunaan air untuk berbagai keperluan membuat ketersediaannya, khususnya air bersih, semakin berkurang. Kompetisi penggunaan air bersih semakin meningkat di daerah pedesaan maupun perkotaan. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, air juga digunakan untuk kegiatan pertanian, industri, dan kegiatan perekonomian lainnya. Di tambah dengan tekanan populasi membuat pengelolaan air bersih di perkotaan menjadi masalah yang sangat pelik. Masalah itu menjadi semakin pelik bila melihat kenyataan bahwa pengelolaan air tidak dapat

dipisahkan ke dalam wilayah administratif pemerintahan daerah pada umumnya. Hal ini berarti air harus dikelola secara terintegrasi.

Dengan keterbatasannya ini, sungguh keliru kalau orang mengeksploitasi air secara berlebih. Mereka memanfaatkan air seolah-olah air berlimpah dan merupakan “barang bebas”. Padahal semakin terbatas jumlahnya, berlakulah hukum ekonomi, bahwa air merupakan benda ekonomis. Buktinya, kini orang rela bersusah-susah dan berani membayar mahal untuk membeli air ketika terjadi krisis air.

Penyediaan air bersih di Indonesia terutama di pedesaan maupun di perkotaan perkotaan masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari kelembagaan, teknologi, anggaran, pencemaran, maupun sikap dari masyarakat. Pengelolaan air bersih ini berpacu dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat serta perkembangan wilayah dan industri yang cepat di perkotaan. Masyarakat dan industri di perkotaan inilah yang termasuk boros air.

Penyediaan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau domestik merupakan usaha yang secara langsung dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kabupaten Bulukumba sebagai kabupaten yang baru terbentuk didalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat pada umumnya menggunakan sistem penyediaan air bersih dengan teknologi yang relatif sederhana.

Tingkat pendidikan rata-rata di masyarakat pedesaan khususnya untuk daerah pedalaman umumnya masih sangat rendah, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih belum dapat diandalkan sebagai salah satu pondasi terlaksananya program pengelolaan air bersih. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat akibat pendidikan yang masih rendah dan kesadaran masyarakat mengakibatkan ketidaktahuan dalam pengelolaan air bersih dengan syarat kesehatan. Dan tingkat ekonomi yang juga masih rendah membuat pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih belum menjadi prioritas.

Di sisi lain masyarakat hanya dapat berbuat sesuai dengan kemampuannya, tanpa ditopang oleh teknologi maupun pengetahuan yang cukup, sehingga saat ini bagi mereka yang mampu dapat memenuhi kebutuhannya melalui air minum dalam kemasan, dan untuk kebutuhan lainnya seperti cuci, mandi dst, mereka menggunakan pompa air (sumur bor / sumur gali) dengan kedalaman yang beragam.

Masyarakat juga diharapkan dapat menyadari akan kebutuhan pokok mengenai air bersih mereka harus diberikan pengetahuan dan pemahaman pentingnya air bersih melalui media sosialisasi atau program pemerintah yang lebih menitikberatkan kepada peningkatan partisipasi masyarakat setempat sehingga mereka lebih banyak memiliki tanggung jawab untuk

mengelola dan mempertahankan atau meningkatkan lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Bulukumba memperlihatkan bahwa dengan jumlah penduduk Pedesaan Kabupaten Bulukumba 131.433 jiwa baru mendapatkan pelayanan air minum tercatat tahun 2010 yaitu 31.307 jiwa atau 23,82% dengan kapasitas sarana PDAM yang terpasang yaitu 34 liter/detik. Akibat rendahnya pasokan air bersih yang ada di wilayah Pedesaan di Kabupaten Bulukumba maka pemerintah setempat bekerja sama dengan pusat berusaha semaksimal memenuhi kebutuhan air baku kepada masyarakat Pedesaan melalui Pamsimas yang merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu *Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSSLIC)*.

Lokasi kegiatan ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu termasuk desa miskin, rendahnya ketersediaan air minum dan sanitasi, tingginya kejadian penyakit terkait air, dan belum menerima bantuan sejenis dalam dua tahun terakhir. Pemerintah menargetkan 15 provinsi, 110 kabupaten/ kota, dan 5.000 desa/kelurahan untuk proyek ini termasuk program replikasi 506 desa. Dengan demikian Pamsimas diharapkan mampu mencakup 5.000 desa dari 36.000 desa tertinggal yang memiliki keterbatasan terhadap sarana air minum dan sanitasi. Melalui realisasi pelaksanaan program Pamsimas, diharapkan kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak dapat

terpenuhi sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesehatan dan tingkat ekonomi sosial masyarakat.

Pengelolaan sarana air minum secara berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu program WSLIC-III/PAMSIMAS dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan pelayanan air minum berbasis masyarakat dimana masyarakat peserta program berperan sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan kontrol.

Proses yang mengajak masyarakat dalam menemukenali berbagai persoalan dan penyakit terkait dengan air dan sanitasi dan kemudian dibimbing untuk melakukan berbagai langkah pencegahannya termasuk menyiapkan sarana yang dibutuhkan seperti air minum dan sanitasi akan membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk hidup bersih dan sehat yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang akhirnya akan tercipta hidup bersih dan sehat. Oleh sebab itu kegiatan program pengelolaan sumber daya air mencakup pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; penyediaan sarana air

minum dan sanitasi umum; pengembangan kapasitas pelaku pengelolaan sumber daya air melalui promosi, pelatihan, lokakarya, bimbingan, dsb.

Sasaran program pengelolaan sarana air minum di Bulukumba adalah masyarakat, terutama kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi, mendapatkan layanan air minum dan sanitasi dan terbangun budaya hidup bersih serta sehat sedangkan strategi dasar yang diterapkan adalah melalui pembangunan pelayanan air minum dan sanitasi dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utama agar tercipta budaya hidup bersih dan sehat. Program pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Bulukumba tersebar beberapa titik daerah pedesaan dan peri-urban yakni dari tahun 2008 hingga 2011 sudah terdapat 39 lokasi yang terealisasi dimana dalam pelaksanaan program tersebut dibangun sarana air minum berupa sumber air minum, bak penampungan (Reservoir) dan pendistribusian air minum melalui perpipaan.

Dengan adanya program pemerintah terkhusus penyediaan sarana air minum yang bersifat partisipatory maka di anggap penting untuk melakukan penelitian berupa Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber daya Air Secara Berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba?
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Tersedianya data bagi peneliti dan pemerintah setempat bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba.
2. Sebagai bahan informasi/kepuustakaan yang diharapkan menjadi landasan baik teoritis maupun konseptual untuk peneliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba.
3. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan agar sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Air merupakan sumber dari kehidupan. Manusia pun juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap air. Terdapat sebuah ironi mengenai air. Walaupun planet bumi merupakan planet yang berkelimpahan air, yaitu dua per tiga luasan bumi tertutup oleh air, namun saat ini di berbagai belahan dunia muncul fenomena kelangkaan air. Indonesia ternyata juga mengalami permasalahan dengan air.

Pada beberapa daerah di Indonesia mulai muncul fenomena kelangkaan air bersih, terutama di musim kemarau. Fenomena kelangkaan air bersih akan semakin parah jika tidak segera dilakukan penanganan yang serius, dan tentunya dapat menghambat perkembangan wilayah. Munculnya fenomena ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa air merupakan sumber daya yang dapat diperbarui, namun tidak disertai kesadaran bahwa untuk dapat memperbarui diri, sumber-sumber air memerlukan lingkungan yang kondusif. Kelangkaan ini lebih terasa pada daerah yang kekurangan sumber air dan tidak terjangkau layanan dari pemerintah, sehingga masyarakat harus berjuang sendiri mencukupi kebutuhannya (Dahuri, 2000).

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Pengelolaan sumberdaya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sistem sumberdaya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan.

Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya alam lainnya. Air adalah sumber daya yang terbarui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat. Tergantung dari waktu dan lokasinya, air dapat berupa zat padat sebagai es dan salju, dapat berupa air yang mengalir serta air permukaan. Berada dalam tanah sebagai air tanah, berada di udara sebagai air hujan, berada di laut sebagai air laut, dan bahkan berupa uap air yang didefinisikan sebagai air udara.

Dewasa ini permasalahan yang cenderung dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya air meliputi ; (1) adanya kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan; (2) persaingan dan perebutan air antara daerah hulu dan hilir atau konflik antara berbagai sektor; (3) penggunaan air yang berlebihan dan

kurang efisien; (4) penyempitan dan pendangkalan sungai, danau karena desakan lahan untuk pemukiman dan industri; (5) pencemaran air permukaan dan air tanah ; (6) erosi sebagai akibat penggundulan hutan.

Permasalahan air yang semakin kompleks ini menuntut kita untuk mengelolah sumberdaya air sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat dengan baik. Berdasarkan UU No 7/2004 tentang Sumberdaya Air, Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupan yang akan terus dibutuhkan sesuai dengan tahapan siklus peradaban manusia. Sebagaimana kita maklumi bahwa salah satu kebijakan Pemerintah yang sangat perlu mendapat perhatian kita bersama adalah masalah penyediaan Sarana Air Bersih baik untuk daerah perkotaan maupun daerah perdesaan (Mubyanto, 1984).

1. Defenisi dan Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan, syarat-

syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat risiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini (Hindarko, 2003).

Rata-rata lebih dari 40.000 kilometer kubik air segar diperoleh dari sungai-sungai di dunia. Ketersediaan ini (sepadan dengan lebih dari 7.000 meter kubik untuk setiap orang) sepintas terlihat cukup untuk menjamin persediaan yang cukup bagi setiap penduduk, tetapi kenyataannya air tersebut seringkali tersedia di tempat-tempat yang tidak tepat. Sebagai contoh air bersih di lembah sungai Amazon walaupun ketersediaannya cukup, lokasinya membuat sumber air ini tidak ekonomis untuk mengekspor air ke tempat-tempat yang memerlukan.

Dalam pemanfaatan hujan sebagai sumber dari air bersih, individu perorangan/ berkelompok/ pemerintah biasanya membangun bendungan dan tandon air yang mahal untuk menyimpan air bersih di saat bulan-bulan musim kering dan untuk menekan kerusakan musibah banjir.

2. Pengelolaan Sumber Daya Air

Secara umum masalah pengelolaan sumberdaya air dapat dilihat dari kelemahan mempertahankan sasaran manfaat pengelolaan sumberdaya air

dalam hal *pengendalian banjir* dan *penyediaan air baku* bagi kegiatan domestik, municipal, dan industri. Masalah pengendalian banjir sebagai bagian dari upaya pengelolaan pengelolaan sumberdaya air, sering mendapatkan hambatan karena adanya pemukiman padat di sepanjang sungai yang cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran sungai karena banyaknya sampah domestik yang dibuang ke badan sungai sehingga mengakibatkan berkurangnya daya tampung sungai untuk mengalirkan air yang datang akibat curah hujan yang tinggi di daerah hulu (Budihardjo, dkk; 1998).

Pada sisi lain penyediaan air baku yang dibutuhkan bagi kegiatan rumah tangga, perkotaan dan industri sering mendapatkan gangguan secara kuantitas – dalam arti terjadinya penurunan debit air baku akibat terjadinya pembukaan lahan-lahan baru bagi pemukiman baru di daerah hulu yang berakibat pada pengurangan luas *catchment area* sebagai sumber penyedia air baku. Disamping itu, secara kualitas penyediaan air baku sering tidak memenuhi standar karena adanya pencemaran air sungai oleh limbah rumah tangga, perkotaan, dan industri.

Dengan diberlakukannya Undang-undang 22/1999 tentang Otonomi Daerah, masalah pengelolaan sumberdaya air ini menjadi lebih kompleks mengingat Satuan Wilayah Sungai (SWS) atau Daerah Pengaliran Sungai (DPS) secara teknis tidak dibatasi oleh batas-batas administratif tetapi oleh

batas-batas fungsional, sehingga dengan demikian masalah *koordinasi* antar daerah otonom yang berada dalam satu SWS atau DPS menjadi sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya air.

Perubahan peran Pemerintah dari institusi penyedia jasa (*service provider*) menjadi institusi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha (*enabler*) agar memiliki kemampuan dalam menyediakan kebutuhan air dan menunjang kegiatan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pengguna air untuk mengelola dan melestarikan potensi-potensi sumber daya air (Hammer, 2004).

Pengelolaan sumberdaya air menghadapi berbagai persoalan yang berhubungan berbagai macam penggunaan dari berbagai macam sektor (pertanian, perikanan, industri, perkotaan, tenaga listrik, perhubungan, pariwisata, dan lain-lain) baik yang berada di hulu maupun di hilir cenderung semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini telah banyak menimbulkan *dispute* antar sektor maupun antar wilayah, yang pada dasarnya merupakan cerminan dari adanya *conflict of interests* yang tajam serta tidak berjalannya fungsi koordinasi yang baik (Hindarko, 2003).

3. Manfaat Pengelolaan Sumber Daya Air

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan, bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata”. Selanjutnya pasal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa:

1. Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat serbaguna untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di segala bidang baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun bidang ketahanan nasional
2. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun, dan kebutuhan air yang cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, sumberdaya air harus dikelola, dipelihara, dimanfaatkan, dilindungi dan dijaga kelestariannya dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sumberdaya air.
3. Pengelolaan sumberdaya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Kodoatie, dkk; 2005).

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, RUU SDA mengamanatkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan di-

pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara tersebut, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional daerah setempat.

Seperti yang kita ketahui selama ini air digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan , untuk pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi. Pengambilannya tidak memerlukan izin dari pemerintah pusat atau daerah. Dengan tidak diperlukannya izin tersebut, maka dinas atau instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air harus memperhitungkan dengan cermat kebutuhan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian, serta sisa ketersediaan air yang ada, sebelum menetapkan dan memberikan alokasi air untuk keperluan perusahaan dan keperluan lainnya (Soemarwoto, 1997).

Salah satu cara yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air adalah pengelolaan yang berdasarkan pada 'watershed' (Daerah Aliran Sungai/DAS). Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari

curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Dengan pengelolaan air berdasarkan DAS maka diharapkan akan tercipta kesinambungan sumber daya air karena air tidak bisa dilihat satu bagian wilayah saja. Pengelolaan air pada suatu daerah tidak bisa begitu saja hanya memperhatikan variabel–variabel hidrologis pada wilayah itu saja. Bahkan, pengelolaan Waduk Saguling untuk keperluan PLTA, misalnya, tidak bisa hanya memperhatikan variabel–variabel disekitar waduk. Seluruh masalah pengelolaan sumber daya air harus memperhitungkan keseluruhan DAS karena bagaimanapun juga bahkan sebuah titik di ujung terluar DAS pun memiliki pengaruh terhadap keberadaan dan kualitas air di sungai utama. Jadi Pengelolaan sumber daya air yang bersifat parsial harus ditinggalkan.

Selain itu, untuk mengelola sumber daya air berbasis DAS ini, kita harus mengacu pada aspek–aspek yang ada dalam DAS tersebut. “Bukan hanya dibatasi pada aspek fisika saja. Tapi juga sosial–budaya, kualitas air, aktivitas industri, politik, ekonomi, demografi (kependudukan) (Supriharyono, 2000).

Pengusahaan sumberdaya air merupakan salah satu lingkup pendayagunaan sumberdaya air, dengan maksud sebagai upaya

pemanfaatan sumberdaya air untuk tujuan usaha dan atau menunjang kegiatan usaha.

Dalam UU No 7/2004 mengatur bahwa sumberdaya air yang meliputi satu wilayah sungai secara keseluruhan (dari hulu ke hilir) hanya dapat dilaksanakan oleh BUMN/BUMD pengelolah sumberdaya air atau kerja sama antara keduanya. Dengan ketentuan tersebut tidak mungkin ada pratek pengalihan, penyerahan atau pelimpahan pengelolaan sumberdaya air suatu secara keseluruhan kepada pihak swasta atau perorangan. Sebagai contoh, Perum Jasa Tirta I di Malang dan Perum Jasa Tirta II di Purwakarta adalah BUMN pengelolah sumberdaya air yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Usaha pengelolaan sumberdaya air juga dapat dilakukan oleh pihak swasta, usaha perorangan, badan usaha atau kerja sama antar badan usaha (seperti PLN, PDAM). Meskipun demikian peran perusahaan ini hanya sebatas pada penggunaan air di lokasi tertentu sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam perizinan yang diberikan pemerintah pusat atau daerah.

Hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pemerintah tidak melakukan “pengalihan saham perusahaan kepada pihak swasta”. Artinya pihak swasta dan perorangan tidak dapat dikatakan menguasai sumber airnya. Pemerintah akan mengatur alokasi air baku untuk kegiatan usahanya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya kewajiban perusahaan sumberdaya

air untuk melakukan konsultasi publik atas rencana pengusahaan sumberdaya air yang bersangkutan, sebelum rencana tersebut dimintakan izinnya kepada Pemerintah pusat/daerah.

4. Penyalahgunaan Sumber Daya Air dan Akibatnya

Salah satu tujuan program pembangunan Sarana Air Bersih adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena dengan adanya Air Bersih diharapkan angka penyakit yang disebabkan dari air yang kurang bersih dapat ditekan dan derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat sehingga dengan demikian masyarakat akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berkarya dalam arti waktu yang tadinya dipergunakan untuk mencari air bersih dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan dengan demikian pendapatan masyarakatpun akan meningkat (Wardhana, 2001).

Sumber-sumber air bersih ini biasanya terganggu akibat penggunaan dan penyalahgunaan sumber air seperti:

1. Pertanian. Penghamburan air akibat ketiadaannya penyaluran air yang baik pada lahan yang diairi dengan irigasi (untuk penghematan dalam jangka pendek) dapat berakibat terjadinya kubangan dan penggaraman yang akhirnya dapat menyebabkan hilangnya produktivitas air dan tanah

2. Industri. Walaupun industri menggunakan air jauh lebih sedikit dibandingkan dengan irigasi pertanian, namun penggunaan air oleh bidang industri mungkin membawa dampaknya yang lebih parah dipandang dari dua segi. Pertama, penggunaan air bagi industri sering tidak diatur dalam kebijakan sumber daya air nasional, maka cenderung berlebihan. Kedua, pembuangan limbah industri yang tidak diolah dapat menyebabkan pencemaran bagi air permukaan atau air bawah tanah, sehingga menjadi terlalu berbahaya untuk dikonsumsi. Air buangan industri sering dibuang langsung ke sungai dan saluran-saluran, mencemarinya, dan pada akhirnya juga mencemari lingkungan laut, atau kadang-kadang buangan tersebut dibiarkan saja meresap ke dalam sumber air tanah tanpa melalui proses pengolahan apapun. Kerusakan yang diakibatkan oleh buangan ini sudah melewati proporsi volumenya. Banyak bahan kimia modern begitu kuat sehingga sedikit kontaminasi saja sudah cukup membuat air dalam volume yang sangat besar tidak dapat digunakan untuk minum tanpa proses pengolahan khusus.
3. Eksploitasi sumber-sumber air secara masal oleh rumah tangga.
Di negara berkembang: Di beberapa tempat di negara bagian Tamil Nadu di India bagian selatan yang tidak memiliki hukum yang mengatur pemasangan penyedotan sumur pipa atau yang membatasi

penyedotan air tanah, permukaan air tanah anjlok 24 hingga 30 meter selama tahun 1970-an sebagai akibat dari tak terkendalikannya pemompaan atau pengairan. Pada sebuah konferensi air di tahun 2006 wakil dari suatu negara yang kering melaporkan bahwa 240.000 sumur pribadi yang dibor tanpa mengindahkan kapasitas jaringan sumber air mengakibatkan kekeringan dan peningkatan kadar garam. Di negara maju seperti Amerika Serikat seperlima dari seluruh tanah irigasi di AS tergantung hanya pada jaringan sumber air (Aquifer) Agallala yang hampir tak pernah menerima pasok secara alami. Selama 4 dasawarsa terakhir terhitung dari tahun 2006, sistem jaringan yang tergantung pada sumber ini meluas dari 2 juta hektar menjadi 8 juta, dan kira-kira 500 kilometer kubik air telah tersedot. Jaringan sumber ini sekarang sudah setengah kering kerontang di bawah sejumlah negara bagian. Sumber-sumber air juga mengalami kemerosotan mutu, di samping pencemaran dari limbah industri dan limbah perkotaan yang tidak diolah, seperti pengotoran berat dari sisa-sisa dari lahan pertanian.

Misalnya, di bagian barat AS, sungai Colorado bagian bawah sekarang ini demikian tinggi kadar garamnya sebagai akibat dari dampak arus balik irigasi sehingga di Meksiko sudah tidak bermanfaat lagi, dan sekarang AS terpaksa membangun suatu proyek besar untuk

memurnikan air garam di Yuma, Arizona, guna meningkatkan mutu sungainya. Situasi di wilayah perkotaan jauh lebih jelek daripada di daerah sumber dimana rumah tangga yang terlayani terpaksa merawat WC dengan cara seadanya karena langkanya air, dan tanki septik membludak karena layanan pengurusan tidak dapat diandalkan, atau hanya dengan menggunakan cara-cara lain yang sama-sama tidak tuntas dan tidak sehat. Hal ini tidak saja mengakibatkan masalah bagi penggunanya sendiri, tetap juga sering berbahaya terhadap orang lain dan merupakan ancaman bagi lingkungan karena limbah mereka lepas tanpa proses pengolahan.

Ketiadaan air bersih mengakibatkan:

1. Penyakit diare. Di Indonesia diare merupakan penyebab kematian kedua terbesar bagi anak-anak dibawah umur lima tahun. Sebanyak 13 juta anak-anak balita mengalami diare setiap tahun. Air yang terkontaminasi dan pengetahuan yang kurang tentang budaya hidup bersih ditenggarai menjadi akar permasalahan ini. Sementara itu 100 juta rakyat Indonesia tidak memiliki akses air bersih.
2. Penyakit cacingan.
3. Pemiskinan. Rumah tangga yang membeli air dari para penjaja membayar dua kali hingga enam kali dari rata-rata yang dibayar

bulanan oleh mereka yang mempunyai sambungan saluran pribadi untuk volume air yang hanya sepersepuluhnya (Hindarko, 2003).

Walaupun air meliputi 70% permukaan bumi dengan jumlah kira-kira 1,4 ribu juta kilometer kubik, namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang dapat benar-benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003%. Sebagian besar air, kira-kira 97%, ada dalam samudera atau laut, dan kadar garamnya terlalu tinggi untuk kebanyakan keperluan. Dari 3% sisanya yang ada, hampir semuanya, kira-kira 87 persennya, tersimpan dalam lapisan kutub atau sangat dalam di bawah tanah (Hammer dkk, 2004).

Keributan masalah air bersih bisa terjadi dalam suatu negara, kawasan, ataupun berdampak ke benua luas karena penggunaan air secara bersama-sama. Di Afrika, misalnya, lebih dari 57 sungai besar atau lembah danau digunakan bersama oleh dua negara atau lebih; Sungai Nil oleh sembilan, dan Sungai Nigeria oleh 10 negara. Sedangkan di seluruh dunia, lebih dari 200 sungai, yang meliputi lebih dari separo permukaan bumi, digunakan bersama oleh dua negara atau lebih. Selain itu, banyak lapisan sumber air bawah tanah membentang melintasi batas-batas negara, dan penyedotan oleh suatu negara dapat menyebabkan ketegangan politik dengan negara tetangganya.

Di seluruh dunia, kira-kira 20 negara, hampir semuanya di kawasan negara berkembang, memiliki sumber air yang dapat diperbarui hanya di

bawah 1.000 meter kubik untuk setiap orang, suatu tingkat yang biasanya dianggap kendala yang sangat mengkhawatirkan bagi pembangunan, dan 18 negara lainnya memiliki di bawah 2.000 meter kubik untuk tiap orang (Hindarko, 2003).

Penduduk dunia yang pada 2006 berjumlah 5,3 miliar diperkirakan akan meningkat menjadi 8,5 miliar pada tahun 2025 akan didera oleh ketersediaan air bersih. Laju angka kelahiran yang tertinggi justru terjadi tepat di daerah yang sumber-sumber airnya mengalami tekanan paling berat, yaitu di negara-negara berkembang.

5. Dampak Pencemaran Sumber Daya Air Terhadap Lingkungan

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia. Pencemaran air adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air tanah, dan sebagainya. Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah tercemar dengan proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan dan mikro organisme yang ada di alam sekitar kita.

Jumlah pencemaran yang sangat masal dari pihak manusia membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi ke seperti semula. Alam menjadi kehilangan kemampuan untuk memurnikan pencemaran yang terjadi. Sampah dan zat seperti plastik, DDT, deterjen dan sebagainya yang tidak

ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi pengrusakan alam yang kian hari kian bertambah parah (Kodoatie, dkk; 2005).

Sebab Pencemaran Lingkungan di Air adalah erosi dan curah hujan yang tinggi, Sampah buangan manusia dari rumah-rumah atau pemukiman penduduk, dan Zat kimia dari lokasi rumah penduduk, pertanian, industri, dan sebagainya.

Adapun Dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia.

1. Limbah cair berdampak pada kesehatan manusia. Pengaruh langsung terhadap kesehatan, umpamanya, tergantung sekali pada kualitas air yang terkontaminasi dalam hal ini berfungsi sebagai media penyalur ataupun penyebar penyakit.
2. air menjadi penyebab timbulnya penyakit.

Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam :

1. Air sebagai media untuk hidup mikroba pathogen
2. Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit
3. Jumlah air bersih yang tersedia tak cukup
4. Air sebagai media untuk hidup vector penyebar penyakit

Akibat dari pencemaran air adalah air tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan jika dimanfaatkan maka diperlukan pengolahan khusus yang menyebabkan peningkatan biaya pengoperasian & pemeliharaan sungai.

Untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran air, dalam aktivitas kita dalam memenuhi kebutuhan hidup hendaknya tidak menambah terjadinya bahan pencemar antara lain tidak membuang sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, sampah/limbah industri secara sembarangan, tidak membuang ke dalam air sungai, danau ataupun ke dalam selokan. Tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan, karena sisa pupuk dan pestisida akan mencemari air di lingkungan tanah pertanian. Tidak menggunakan deterjen fosfat, karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti enceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air (Ramli, 2005).

Pencemaran air yang telah terjadi secara alami misalnya adanya jumlah logam-logam berat yang masuk dan menumpuk dalam tubuh manusia, logam berat ini dapat meracuni organ tubuh melalui pencernaan karena tubuh memakan tumbuh-tumbuhan yang mengandung logam berat meskipun diperlukan dalam jumlah kecil. Penumpukan logam-logam berat ini terjadi dalam tumbuh-tumbuhan karena terkontaminasi oleh limbah industri. Untuk menanggulangi agar tidak terjadi penumpukan logam-logam berat, maka limbah industri hendaknya dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Proses pencegahan terjadinya pencemaran lebih baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang telah terjadi.

Limbah industri sebelum dibuang ke tempat pembuangan, dialirkan ke sungai atau selokan hendaknya dikumpulkan di suatu tempat yang disediakan, kemudian diolah, agar bila terpaksa harus dibuang ke sungai tidak menyebabkan terjadinya pencemaran air. Bahkan kalau dapat setelah diolah tidak dibuang ke sungai melainkan dapat digunakan lagi untuk keperluan industri sendiri. Sampah padat dari rumah tangga berupa plastik atau serat sintesis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dipisahkan, kemudian diolah menjadi bahan lain yang berguna, misalnya dapat diolah menjadi keset. Sampah organik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme dikubur dalam lubang tanah, kemudian kalau sudah membusuk dapat digunakan sebagai pupuk (Darmono, 2001).

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Defenisi Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi merupakan suatu istilah yang banyak digunakan dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi berasal dari bahasa latin yang berbentuk kata kerja “participere” yang bermakna peran serta atau daripada ketelibatan fisik saja akan tetapi lebih dulu lagi yakni mencakup pikiran, perasaan dan kemauan (Sastroputro, 1997).

Menurut Davis (1967) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan mental, pikiran dan perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang

mendorongnya untuk memberikan sumbangan atas bantuan kepada kelompok tersebut dalam usaha mencapai tujuan bersama dan turut bertanggung jawab terhadap usaha bersangkutan. Mubyanto (1984) menyebutkan bahwa partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan diri sendiri. Substansi partisipasi masyarakat dalam pengertian tersebut adalah partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan implementasi.

Mishra dan Kushal (1984) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat secara sukarela dalam seluruh tahapan pembangunan dan bukan melalui para wakilnya. Pengertian tersebut mengandung empat substansi pokok yaitu: (1) partisipasi dalam perencanaan kegiatan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, (3) partisipasi dalam pemberian keuntungan dan (4) partisipasi dalam pemantauan kegiatan.

Partisipasi oleh beberapa ahli dikaitkan dengan upaya dalam mendukung program pemerintah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Rahardjo (1985) bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program-program pemerintah. Sedangkan menurut Dudung (1995), partisipasi masyarakat sangat mutlak demi keberhasilan pembangunan, tanpa partisipasi khususnya dalam memanfaatkan hasil-hasil

pembangunan berarti masyarakat tidak mengalami peningkatan kesejahteraan dan program pembangunan dinilai tidak berhasil.

Slamet (1994) berpendapat bahwa timbulnya partisipasi ditandai dengan tiga ciri pokok, yaitu : (1) adanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan pembangunan, (2) adanya kemampuan untuk ikut berperan dalam pembangunan, dan (3) adanya kemauan untuk ikut serta dalam pembangunan.

Menurut Soetrisno (1995) terdapat dua jenis pengertian partisipasi yang beredar di masyarakat, yaitu (1) partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diartikan sebagai dukungan rakyat terhadap proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana, dan (2) partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Tjokroamijoyo (1976) menyatakan bahwa rakyat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan perkataan lain partisipasi dalam pembangunan dapat tercipta apabila masyarakat merasa ikut dalam pembangunan dapat tercipta apabila masyarakat merasa ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Sebagaimana halnya yang dikemukakan

Hamijoyo (1977) bahwa keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan pembangunan yang telah diambil. Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dimaksud adalah: (1) partisipasi buah pikiran, (2) partisipasi keterampilan, (3) partisipasi tenaga, (4) partisipasi harta dan (5) partisipasi uang.

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konsep partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang atau kelompok orang secara fisik dan mental bekerjasama dalam suatu proses kegiatan tertentu tanpa punya rasa keterpaksaan dengan tujuan agar mendapatkan manfaat dari hasil kerjasamanya. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang warga masyarakat tertentu tanpa punya rasa keterpaksaan, sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan harapan memperoleh manfaat dari hasil kerjasamanya itu. Substansi masyarakat tersebut meliputi partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat dan evaluasi (Sastropoetro, 1988).

2. Jenis partisipasi masyarakat

Pengkajian terhadap jenis-jenis partisipasi dapat diamati dalam berbagai segi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Rahim (1975) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu : (1) ikut memberikan masukan dalam proses pembangunan,

menerima imbalan atas masukan tersebut menikmati hasil pembangunan, (2) ikut memberi masukan dan ikut menikmati hasil pembangunan, (3) ikut memberi masukan dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan,(4) menikmati hasil pembangunan tanpa memberikan masukan dan (5) memberi masukan tanpa menerima imbalan dan tidak ikut menikmati hasil pembangunan.

Gultom (1985) membedakan partisipasi atas dua jenis, yaitu: (1) partisipasi yang bersifat swakarsa, yaitu keikutsertaan atau peran serta seseorang dalam kegiatan didasarkan atas kesadaran dan kemauan sendiri dan (2) partisipasi yang bersifat dimobilisasikan, yaitu keikutsertaan atau peran serta seseorang dalam suatu kegiatan atas penghargaan orang lain. Slamet (1989) mengemukakan partisipasi masyarakat dapat diklarifikasi atas partisipasi aktif dan pasif. Masyarakat dikatakan partisipasi aktif jika mereka terlibat dalam pembuatan keputusan dan atau melaksanakan suatu keputusan pembangunan. Sedangkan partisipasi pasif jika keterlibatan tersebut bersifat tidak langsung.

Dari uraian tersebut diatas, maka jenis-jenis partisipasi masyarakat yang diharapkan muncul dalam suatu program pembangunan adalah partisipasi interaktif dan mobilisasi swakarsa atau partisipasi dalam bentuk kemitraaan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat pada berbagai tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai

pada pemanfaatan serta pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pembangunan.

Partisipasi warga menekankan pada 'partisipasi langsung' warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses ke pemerintahan. Gaventa dan Valderama, menegaskan bahwa partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap 'penerima derma' atau 'kaum tersisih' menuju ke suatu kepedulian dengan pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka (Slamet, 2003).

Konsep partisipasi warga juga sering dikaitkan dengan demokrasi partisipatoris, demokrasi deliberatif, atau demokrasi langsung. Gagasan mengenai demokrasi partisipatif kembali diperhitungkan sejak tahun 1960-an sebagai dampak dari kegagalan demokrasi liberal dalam menjawab keadilan social dan kemiskinan. Demokrasi liberal yang mendasarkan pada demokrasi perwakilan, ditambah dengan sistem birokrasi yang teknokratis dianggap telah gagal memfasilitasi keterlibatan warga terutama kelompok miskin dalam pemerintahan. Ide dasar dari demokrasi partisipatif adalah bagaimana kekuasaan politik dikembalikan lagi kepada seluruh rakyat. Rakyat, tidak tergantung pendidikan, keturunan, agama, jenis kelamin, maupun harta kekayaan yang dimilikinya, selayaknya ikut serta dalam pengambilan

keputusan yang penting bagi dirinya. Melalui proses ini maka partisipasi warga dapat diperluas dan diperdalam sebagai bagian dari pendalaman demokrasi.

Dalam konteks tata pemerintahan, partisipasi warga seringkali dihubungkan dengan manajemen atau model pemerintahan. Gottdiener (1987) menghubungkan partisipasi dengan sistem tata pemerintahan (*governance*) yang berpusat rakyat (*society center*) sebagai lawan dari tata pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip manajemen (*state managerialism*). Tata pemerintahan yang berpusat rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberlanjutan demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial. Pilihan ini mengandung konsekuensi harus semakin menguatnya partisipasi masyarakat di satu sisi, sementara di sisi yang lain pemerintah harus mengambil peran sebagai fasilitator dalam menegosiasikan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda atau saling bertentangan.

Partisipasi berarti mendorong proses belajar bersama, komunikasi yang seimbang dalam membahas persoalan publik, menjadikan kesepakatan warga sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan di tingkat politik formal, dan memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk mengontrol keputusan publik agar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Peters (1996), menghubungkan partisipasi

dengan berkembangnya berbagai model pemerintahan. Menurut Peter, partisipasi yang luas dapat tumbuh dalam tata pemerintahan partisipatif (*participatory state*) yang lebih menekankan negosiasi dan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan ketimbang hirarki dan teknokrasi (Soehendy, 1997).

Dalam tata pemerintahan yang berpusat rakyat atau tata pemerintahan partisipatif, kebijakan ditempatkan sebagai proses sosial politik tempat warga menegosiasikan alokasi barang dan anggaran publik. Kebijakan bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis oleh kelompok orang yang dipercaya untuk merumuskan itu (biasanya politisi, birokrat, atau akademisi).

Kebijakan merupakan ruang bagi teknisi dan anggota masyarakat untuk melakukan interaksi dan menggabungkan pengetahuan. Karena itu kebijakan harus melibatkan pihak yang luas, dan agar dapat terlaksana harus menjamin agar kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*) sudah dikonfrontasi atau dinegosiasikan. Dalam perspektif ini partisipasi tidak dipandang sebagai cara melainkan tujuan itu sendiri (Sulaiman, 1985).

Dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik, partisipasi telah mengundang perdebatan antara pendukung dan para kritiknya. Para pendukung partisipasi mengungkapkan keunggulan partisipasi yaitu: menjamin ketercapaian tujuan, membangun kapasitas lokal, meningkatkan

cakupan pengambil kebijakan, target keuntungan yang lebih baik, menjamin keberlanjutan, dan menjamin suara kelompok marjinal terutama kelompok miskin dan perempuan terakomodasi.

Sedangkan bagi kritisnya partisipasi dapat menyebabkan: membengkaknya biaya dan waktu untuk formulasi kebijakan, destabilisasi kekuatan politik, terlalu ideologis, dan menjatuhkan beban pada orang miskin. Mengingat penerapan konsep partisipasi warga harus melibatkan struktur politik dan birokrasi pemerintahan, maka kerangka hukum merupakan syarat perlu (*necessary condition*). Hal ini disebabkan di satu sisi perangkat politik dan pemerintahan hanya mungkin bekerja berdasarkan pada aturan hukum, dan di sisi lain warga dapat masuk dalam proses pengambilan kebijakan publik bila ruang untuk partisipasi telah disediakan oleh perangkat hukum.

3. Partisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air. Mekanisme yang ditawarkan oleh UU No. 7/2004 untuk peran serta masyarakat adalah “konsultasi publik”. Menurut UU No. 7/2004, yang dimaksud dengan konsultasi publik adalah upaya menyerap aspirasi masyarakat melalui dialog dan musyawarah dengan semua pihak yang berkepentingan. Konsultasi publik bertujuan mencegah

dan meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul serta untuk mendorong terlaksananya transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih adil. Konsultasi publik dilakukan baik dalam tahap penyusunan pola pengelolaan sumber daya air (perencanaan) maupun dalam tahap pelaksanaan pengembangan sumber daya air. Selain masyarakat, UU No. 7 tahun 2004 juga membuka peluang bagi dunia usaha untuk terlibat dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air.

Undang-Undang No. 7/2004 juga menekankan bahwa pelibatan warga dan dunia usaha dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan (*stakeholders*) untuk diolah dan dituangkan dalam arahan kebijakan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha tersebut dilakukan melalui konsultasi publik yang diselenggarakan minimal dalam 2 (dua) tahap. Konsultasi publik tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan masyarakat dan dunia usaha atas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Konsultasi publik tahap kedua dimaksudkan untuk sosialisasi pola yang ada guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan dunia usaha yang ada di wilayah sungai yang bersangkutan (Susanto, 1999).

Dunia usaha yang dimaksud di sini adalah koperasi, badan usaha milik negara, serta badan usaha milik daerah dan swasta. Dalam konsultasi publik,

masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat Dalam pelaksanaan program, UU No. 7/2004 menegaskan bahwa pelaksanaan pengembangan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei, investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi. Baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan, UU No. 7/2004 tidak menjelaskan secara rinci siapa peserta konsultasi publik, bagaimana mekanisme konsultasi publik, dan daya ikat dari keputusan yang disepakati dalam konsultasi publik (Slamet, 1993).

Seperti yang telah di jelaskan pada UU No 7 Tahun 2004 bahwa masyarakat secara utuh terlibat dalam pengelolaan sumber daya air yang dapat menghasilkan atau mewujudkan dunia usaha dari segi pemanfaatan sumber daya air. Maka dapat dimengerti bahwa pengelolaan sumber daya air yang melibatkan masyarakat adalah dalam bentuk partisipasi.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977:8) dalam Didi Prayitno. 2008, menyatakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan terdiri dari :

- 1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

Perencanaan adalah suatu proses pemantauan tindakan yang berkenaan dengan perkiraan tujuan dan target yang hendak dicapai,

biaya, tenaga, waktu, bahan dan alat yang diperlukan dalam suatu kegiatan tertentu.

Menurut Mubyarto dan Katodirjo (1988), partisipasi dalam perencanaan menyangkut partisipasi dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Keputusan tersebut menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mishra (1984), dapat dibedakan atas keputusan dasar, keputusan yang sementara berlangsung dan keputusan operasional.

Menurut Kuswata (1993) dan Slamet (1994), secara rinci kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proses perencanaan adalah sebagai berikut : 1) Mengidentifikasi masalah, kebutuhan, sumber-sumber tersedia yang dapat dilibatkan dan kondisi-kondisi lingkungan yang berpengaruh; 2) Pemilihan dan penentuan jenis kebutuhan dan pemilihan prioritas masalah yang akan diselesaikan; 3) Perumusan dan penilaian kondisi-kondisi lingkungan yang berpengaruh; 4) Penentuan lokasi proyek; 5) Perumusan tujuan dan target yang ingin dicapai; 6) Penentuan jenis-jenis kegiatan; 7) Penentuan personal pelaksana untuk setiap jenis kegiatan; 8) Perhitungan biaya dan penentuan sumber-sumber yang mungkin diperoleh; 9) Penentuan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan; (10) Penentuan pemimpin untuk sejenis kegiatan; 11) Distribusi tugas

pada personal pelaksana untuk setiap jenis kegiatan; 12) Penentuan cara-cara pelaksanaan teknis di lapangan; dan 13) Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan.

2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Ada beberapa cara masyarakat desas untuk terlibat dalam implementasi kegiatan pembangunan. Menurut Mishra (1984) maupun Cohen dan Uphoff (1977), diantara beberapa cara itu adalah sebagai berikut : 1) Partisipasi melalui kontribusi sumber-sumber yang dibutuhkan oleh program pembangunan dan 2) Partisipasi melalui usaha-usaha administrasi dan koordinasi.

Partisipasi melalui kontribusi sumber-sumber dapat berupa penyediaan tenaga kerja, uang, material/benda dan informasi yang dibutuhkan oleh program pembangunan. Partisipasi melalui kegiatan administrasi dan koordinasi dapat berupa : pendapatan kegiatan dan kemajuannya, melakukan kontak langsung dengan unsur-unsur terkait, menjadi anggota dewan penasehat atau pengambilan keputusan.

3) Partisipasi Masyarakat dalam Penerima Manfaat

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Manfaat atau keuntungan itu dapat berbentuk material sosial dan

personal. Keuntungan material menyangkut barang-barang pribadi, seperti : konsumsi, income (pendapatan) dan asset. Peningkatan konsumsi dapat terjadi apabila diikuti dengan peningkatan hasil (pendapatan). Peningkatan pendapatan dapat tercapai bila terjadi peningkatan produksi dan peningkatan produksi dapat terjadi bila terdapat peningkatan pemilikan lahan dan lain sebagainya. Keuntungan social menyangkut barang-barang public berupa jasa-jasa dan fasilitas-fasilitas social yang dapat meningkatkan status social. Keuntungan personal dapat berupa rasa bangga terhadap diri sendiri, rasa efisien dan rasa memiliki kekuatan politik. Keuntungan lain yang sifatnya fundamental adalah setiap individu dapat menginternalisasi nilai-nilai yang ditransformasikan program.

4) Partisipasi masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi

Cohen dan Uphoff (1977), pemantauan adalah kegiatan mengumpulkan informasi secara terus menerus mengenai input-input program, sasaran-sasaran, kondisi dan aktifitas program serta dampaknya. Tujuan pemantauan adalah untuk mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan yang akan mempengaruhi keberhasilan program pembangunan. Evaluasi adalah suatu proses menganalisa informasi untuk keperluan pertimbangan, menarik kesimpulan dan membuat keputusan mengenai hasil-hasil akhir kegiatan

(membandingkan input- dan output program). Sehubungan dengan itu, maka tujuan evaluasi adalah untuk mengenal bseberapa besar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dan bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan baik fisik, biologi maupun social. Karen itu, kegunaan evaluasi adalah untuk meningkatkan efektiiftas dan efisiensi dan memberukan masukan dlam penyempurnaan rencana kegiatan yang akan dating.

Kemudian Tikson (2000) menyatakan bahwa pendekatan partiipasi dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat local, dipahami sebagai sebuah metodda yang mengutamakan keterlibatan masyarakat atau kelompok orang dalam seluruh tahapan proses pembangunan , termasuk penggagasan dan perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan kegiatan mobilisasi anggota masysarakat untuk menmbangun, dimana mreka terlibat secara aktif dan bekerjassama dengan pihak-pihak lain, termasuk para penentu kebijakan, pejabat pemerintah dan semua unsur yang terlibat. Dengan kata lain, pendekatan kolektif melalui teknik-teknik yang dibuat untuk :

- 1) Mengembangkan kemandirian;
- 2) Menciptakan tanggungjawab bersama;
- 3) Membangkitkan kesadaran untuk memecahkan masalah;
- 4) Mobilisasi untuk menolong diri sendiri (Self help);
- 5)

Memberdayakan kelompok miskin; 6) Menggunakan sumber daya manusia; 7) Pengorganisasian kegiatan kolektif; dan 8) Membuat masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan.

3.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan. Menurut Sherry R. Arnstein, 1969 dalam Panudju (1999:69-76) membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 (delapan) tingkat partisipasi masyarakat yang sangat terkenal dimana mendasarkan pada “kekuasaan” yang diberikan kepada masyarakat. Tingkatan partisipasi masyarakat dari yang tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut :

1. *Citizen Control*

Publik dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negoisiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk mendapatkan bantuan tanpa melalui pihak ketiga.

2. *Delegated Power*

Pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negoisiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.

3. *Partnership*

Publik berhak berunding dengan pengambil keputusan/pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan serta pemecahan masalah yang dihadapi.

4. *Placation*

Pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mempengaruhi keputusan.

5. Consultation

Masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survey tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.

6. Informing

Pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.

7. Therapy

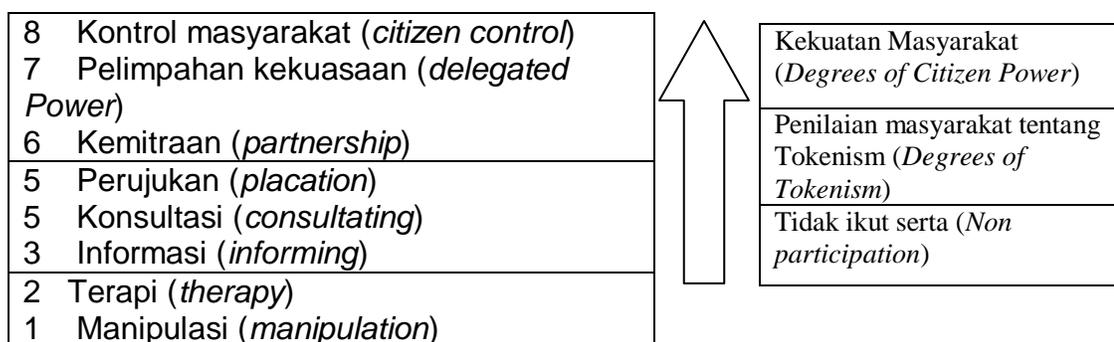
Pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

8. *Manipulasi*

Merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Dari tipologi yang diajukan oleh Arnstein dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar secara ringkas dan grafis dapat dijelaskan dalam gambar 1

1. Tidak ada partisipasi sama sekali atau *non participation*, yang meliputi *manipulation* dan *therapy*.
2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tokenism*, meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*.
3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizen power*, meliputi *partnership*, *delegated power* dan *citizen power*.



Gambar 1. Tipologi Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein

3.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

- a) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- b) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- c) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- d) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- e) Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

- f) Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
- g) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
- h) Partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Partisipasi lebih dititik beratkan kepada aktivitas seseorang dalam suatu organisasi. Menurut Rozen Berg dalam Tjokrowinoto (1984: 24) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pikirannya bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggungjawab terhadap organisasi tersebut.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat dinyatakan dalam bentuk pemikiran, keterampilan/ keahlian , tenaga , harta benda atau uang (Keith Davis dalam Santoso, 1988: 16). Sejalan dengan itu , Surbakti (1984: 72-73) mengemukakan bahwa kegiatan yang dapat digolongkan partisipasi antara lain : (1) ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan (2) ikut

serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang alternatif program yang dianggap paling baik (3) ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan termasuk disini memberi iuran atau sumbangan materill (4) Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan.

Bagian terpenting dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Bulukumba adalah kewenangan masyarakat untuk memutuskan sebagai pelaku utama tanpa pemaksaan keadaan ini disebabkan karena masyarakat memahami dan lebih mengetahui persoalan di daerahnya.

3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air

Masyarakat yang mengambil keputusan untuk kebijakan serta memegang kendali dalam sistem pengelolaan sumber daya air merupakan TUJUAN ideal partisipasi. Selain tujuan ideal sebagai pengambil keputusan tujuan khususnya adalah meningkatkan nilai-nilai gotong royong yang merupakan budaya atau adat. Keterlibatan masyarakat memiliki kualitas tersendiri dalam partisipasi tersebut. Hal ini sejalan dengan makna pengambil alihan sebagian kegiatan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat mempengaruhi keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, jenis

kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dan lamanya tinggal, biasanya ini disebutkan sebagai faktor Internal atau dari dalam diri masyarakat.

Angell dalam Firmansyah ,2010 mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu :

1. Usia

Faktor usia merupakan yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral pada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur sebagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “didapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan.

Hal ini dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980 dalam Firmansyah, 2009), yakni :

1. Informasi dan komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem diluarnya.
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.
4. Kebebasan untuk berprasaangka dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbulnya dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

C. Program Nasional WSLIC-III/PAMSIMAS

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar

sebesar 50 % pada tahun 2015. Berdasarkan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia.

Ruang lingkup kegiatan Program WSLIC-III/PAMSIMAS mencakup 5 (lima) komponen proyek yaitu:

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;

1. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;
2. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;
3. Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan
4. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.

Program WSLIC-3/PAMSIMAS merupakan salah satu program AMPL-BM (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat) di

Indonesia, Program PAMSIMS adalah aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif dan berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya dan miskin) dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*) . Proyek yang tanggap terhadap kebutuhan berarti bahwa proyek menyediakan sarana dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat inginkan, bersedia untuk berkontribusi dan membiayai; dan dapat mengelola dan memelihara sehingga terbentuk rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kegiatan yang dilakukan dan mengelola secara sukarela. Untuk itu perlu dilakukan suatu usaha pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat dan lingkungan sekolah.

Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban).

Secara lebih rinci program Pamsimas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;
2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

Sasaran program ini adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi.

Indikator Capaian Utama (KPI) PAMSIMAS (2008 – 2012)

1. Bertambahnya 6 – 7 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses akses air minum

2. Bertambahnya 3,1 juta penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi
3. Bertambahnya 80% masyarakat “Stop BABS”
4. Bertambahnya 80% masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun
5. Adanya rencana peningkatan kapasitas Pemerintah Kab./Kota pelaksana PAMSIMAS untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan PAMSIMAS
6. Meningkatnya prosentase anggaran Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi serta perluasan pendekatan program untuk pencapaian target MDGs.

Tabel 1. Kinerja Capaian KPI Program Pamsimas Sampai Dengan Pelaksanaan Ta. 2012 (September 2012)

NO.	INDIKATOR CAPAIAN UTAMA (KPI)	TARGET S/D 2012 (Amend FA)	TARGET S/D DES'11	REALISASI S/D 25 SEPT'12
1.	Bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses air minum	6 – 7 juta	3 – 5 juta	4, 26 juta
2.	Bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi	3,1 juta	1,5-2,4 juta	3,10 juta
3.	Bertambahnya masyarakat yang 'Stop BABS'	80%	60%	47,11%
4.	Bertambahnya masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun	80%	66%	58,85%
5.	Adanya rencana penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan PAMSIMAS	100%	50%	100%
6.	Meningkatnya prosentasi alokasi anggaran Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) yang diperlukan untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi serta perluasan pendekatan program untuk pencapaian target MDGs	100%	50%	50%

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan BAPPEDA

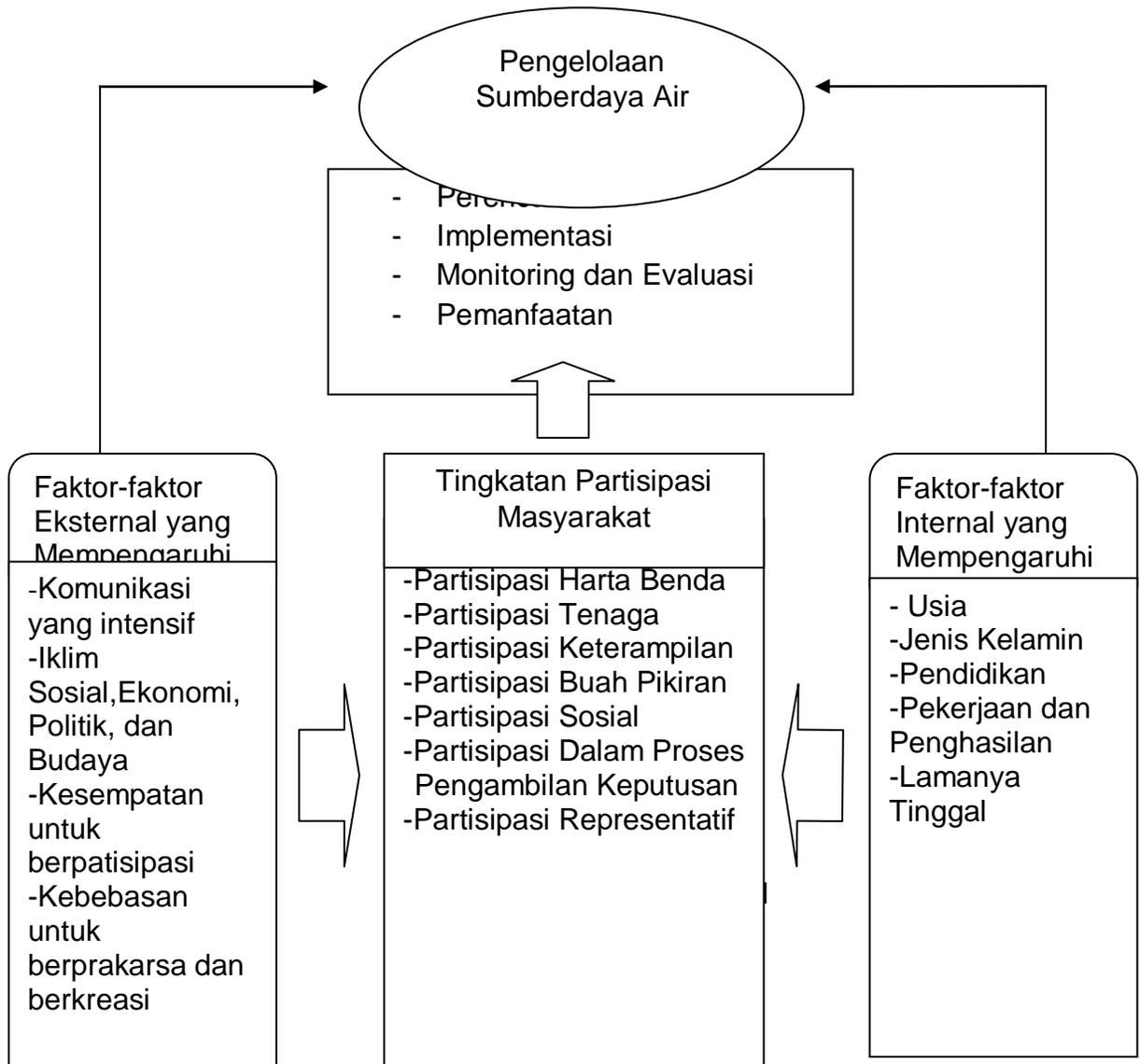
D. Kerangka Pemikiran

Pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah Pengelolaan sumberdaya air secara partisipatif yang berkelanjutan dimana dalam pengelolaan sumber daya air ini terdapat tahapan-tahapan partisipasi dimulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan pemanfaatan dari pada pembangunan yang dicapai melalui partisipasi. Dalam berpartisipasi terdapat beberapa fakto-faktor internal/dari dalam yang mempengaruhi partisipasi, yakni usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta lamanya tinggal dalam suatu lingkungan tertentu. Dan ada pula faktor-

faktor eksternal atau luar/lingkungan diantaranya adalah factor komunikasi yang intensif, factor iklim sosial, ekonomi, politik, dan budaya, factor Kesempatan untuk berpartisipasi, serta factor Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Dari kedua factor ini menimbulkan tingkatan partipasi masyarakat yang akan melaksanakan tahapan-tahapan partisipasi itu sendiri, adapun tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air ini adalah Partisipasi Masyarakat berupa partisipasi Harta Benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Partisipasi masyarakat sebagai manifestasi demokratisasi muncul sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti sumber air dan juga sebagai bentuk upaya mempertahankan dirinya karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun pendekatan partisipatif dalam usaha pemenuhan kebutuhan air bersih ini perlu dikaji lebih mendalam prosesnya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam proses yang terjadi. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2 :

Gambar 2. Skema Kerangka Pikir



E. Defenisi Operasional

1. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupan yang akan terus dibutuhkan sesuai dengan tahapan siklus peradaban manusia.

2. Sumber daya air adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi
3. Pengelolaan adalah suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan wilayah beserta segenap sumberdaya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan”. **Definisi ke (2)** “Suatu proses kontinyu dan dinamis dalam penyusunan dan pengambilan keputusan tentang pemanfaatan berkelanjutan dari wilayah pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terdapat didalamnya”. **Definisi ke (3)** “Suatu proses kontinyu dan dinamis yang mempersatukan/mengharmoniskan kepentingan antara berbagai stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat lokal dan LSM); dan kepentingan ilmiah dengan pengelolaan pembangunan dalam menyusun dan mengimplementasikan suatu rencana terpadu untuk membangun (memanfaatkan) dan melindungi ekosistem beserta segenap sumberdaya alam yang terdapat didalamnya, bagi kemakmuran/kesejahteraan umat manusia secara adil dan berkelanjutan.
4. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

5. Tujuan pengelolaan sumber daya air, adalah mendukung pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan dengan mewujudkan keberlanjutan sumber daya air. Sedangkan asas yang digunakan dalam pencapaiannya adalah asas kelestarian, keseimbangan fungsi, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas. Menurut Savenije (1997) aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air dapat meliputi hal-hal dibawah ini keberlanjutan teknis, keberlanjutan financial, keberlanjutan institusional, keberlanjutan social, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan.
6. Partisipasi merupakan suatu istilah yang banyak digunakan dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi berasal dari bahasa latin yang berbentuk kata kerja “participere” yang bermakna peran serta atau daripada ketelibatan fisik saja akan tetapi lebih dulu lagi yakni mencakup pikiran, perasaan dan kemauan (Sastroputro, 1997).

Menurut Davis (1967) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan mental, pikiran dan perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan atas bantuan kepada kelompok tersebut dalam usaha mencapai tujuan

bersama dan turut bertanggung jawab terhadap usaha bersangkutan. Mubyanto (1984) menyebutkan bahwa partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan diri sendiri. Substansi partisipasi masyarakat dalam pengertian tersebut adalah partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemantauan dan evaluasi.

7. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat secara sukarela dalam seluruh tahapan pembangunan dan bukan melalui para wakilnya (Mishra dan Kushal, 1984).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2012. Kegiatan penelitian terdiri atas: survei pendahuluan, pengambilan data primer dan sekunder berdasarkan dari jenis partisipasi yang dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data. Wilayah atau lokasi penelitian terletak di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa Mattoanging Kecamatan Kajang dan Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari. Pemilihan ke 2 lokasi ini didasarkan pada hasil observasi yang menunjukkan bahwa pada Desa dan Kelurahan ini tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan sumber daya air.

B. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer, yaitu semua data yang diperoleh langsung dari responden dalam hal ini masyarakat yang ada di daerah penelitian melalui observasi dan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang mengandung pertanyaan mengenai

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

- b. Data sekunder, yaitu semua data yang dikumpulkan dari melalui penelusuran berbagai kepustakaan, yaitu dari berbagai macam buku jurnal, jurnal, artikel dan hasil penelitian yang terkait serta menelaah berbagai macam dokumen resmi yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dan menerima program penyediaan air minum atau WSLIC-III/PAMSIMAS.

Teknik Sampling

Jenis sampel yang dipilih berdasarkan purposive sampel dimana pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan karakteristik populasi untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sejauhmana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum di kabupaten Bulukumba. Peneliti ingin menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul dengan menjangir

sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan konstruksinya.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, orang-orang yang dijadikan sampel disebut sebagai pemberi informasi (informan) yaitu individu yang menjadi pelaku, terlibat, berperan secara langsung/tidak langsung dan mengetahui permasalahan yang ada (Moleong:165). Responden yang akan menjadi obyek studi adalah masyarakat yang menerima program penyediaan air minum yang dapat mewakili populasi dalam memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan penyediaan air minum mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemanfaatan. Sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga di tiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Singarimbun, 1981).

Dalam penyebaran kuesioner, sebagai populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terkena sasaran program penyediaan sarana air minum diambil sampel masing-masing sebanyak 60 responden, hal ini berdasarkan pada:

- a. Untuk penelitian yang menggunakan analisis data dengan statistik besar sampel agar mencapai distribusi normal, maka sampel yang diambil minimal sejumlah 30 sampel (M. Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1995:171).

- b. Besarnya sampel yang ditarik dari populasinya tergantung pada variasi yang ada di kalangan anggota populasi. Apabila anggota populasinya homogen, maka sampel yang kecil dapat mewakili seluruh populasi karena mempunyai karakteristik yang sama (Gulo, W. 2002:81-82). Makin homogen suatu populasi, makin kecil sampelnya, sedangkan makin besar variasinya makin besar sampel yang dibutuhkan.
- c. Menurut Sutrisno Hadi (1990:73) dalam menentukan besaran sampel, sebenarnya tidak ada ketepatan mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari populasi, yang harus diperhatikan adalah keadaan homogenitas populasi, karena jika keadaan populasinya homogen jumlah sampel hampir-hampir tidak menjadi persoalan.

Penentuan sampel menggunakan rumus (Solvin, 1999) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

yang mana, n = jumlah sampel; N = jumlah populasi (3236 orang); e = kemungkinan ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (9%). Hasil perhitungan jumlah sampel yang akan di ambil disajikan dalam perhitungan berikut:

$$n = \frac{3236}{1 + 3236(0.09)^2}$$

$$n = \frac{3236}{26.967} = 120$$

Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 orang.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan ke lokasi penelitian dengan menggunakan catatan observasi (daftar check list). Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan Sarana Air Minum di wilayah Kabupaten Bulukumba.
- b. Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan mengisi daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti kepada responden (masyarakat dalam hal ini masyarakat yang terkena program) yang berada disekitar penyediaan air minum dengan tujuan untuk memperoleh data dan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum. Disamping itu, juga dilakukan wawancara langsung dengan berbagai informan, seperti tokoh masyarakat dan unsur pemerintah yang terkait, dengan tujuan untuk memperoleh data dan gambaran mengenai pengelolaan Sarana Air Minum.
- c. Dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen dengan data pendukung, yakni: gambar peta lokasi, kondisi

umum wilayah penelitian, kondisi demografi penduduk dan sosial ekonomi secara umum yang diambil dari kantor BPS setempat, serta program kerja Pemda Kabupaten Bulukumba (Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Cipta Karya dan Bappeda) yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan studi ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif didukung dengan kualitatif serta metode tabulasi silang. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Metode untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat.

Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dipakai metode analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil pengambilan data dari responden maka dapat diketahui presentase bentuk partisipasi masyarakat yang diinginkan dalam pengelolaan sarana air minum dan pendistribusian air secara perpipaan baik bentuk sumbangan maupun bentuk kegiatan.

- b. Metode untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum merupakan derajat keterlibatan masyarakat atau warga dalam setiap kegiatan bersama yang dilaksanakan untuk mengelola setelah selesai

dibangunnya prasarana. Derajat keterlibatan warga tersebut diukur dengan pemikiran semakin banyak anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan bersama ataupun semakin besar kesediaannya menyumbangkan pikiran, tenaga atau bentuk sumbangan lain maka semakin tinggi tingkat peran sertanya.

Kriteria penilaian berdasarkan pertimbangan terhadap kepentingan, manfaat atau pengaruh dari masing-masing bentuk kegiatan partisipasi terhadap proses pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Dalam mencapai tujuan bersama masing-masing anggota dalam organisasi mempunyai peranan dan tanggung jawab yang jelas dan dapat memberikan tanggapan yang fleksibel terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini tingkat partisipasi dapat diketahui dari tingkat kehadiran warga dalam pertemuan, keaktifan warga dalam berdiskusi, keterlibatan warga dalam kegiatan fisik dan kesediaan warga dalam memberikan sumbangan dana atau iuran. (Singarimbun, dkk; 1989).

Frekuensi tingkat partisipasi diukur berdasarkan penentuan nilai atau dengan kata lain indikator mana yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat pada pengelolaan sarana air minum. Dalam hal ini indikator yang mempunyai pengaruh paling tinggi mempunyai skor yang lebih tinggi pula, demikian sebaliknya. Skor setiap bentuk partisipasi diberikan nilai antara 1 - 8, besarnya nilai untuk masing-masing bentuk

partisipasi ini dibatasi pada proses keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi dalam pengelolaan sarana air minum yang diasumsikan sebagai berikut:

Nilai 1 = tidak ada partisipasi.

Nilai 2 = bentuk partisipasi yang tidak memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif, misalnya kehadiran masyarakat dalam pertemuan warga atau kegiatan penyuluhan teknis yang tujuannya sekedar memberikan informasi atau pemahaman tentang pelaksanaan program yang direncanakan.

Nilai 3 = bentuk partisipasi yang tidak terlalu besar pengaruhnya, misalnya sumbangan pikiran pada tahap penyusunan rencana. Karena pada tahap ini pihak pengelola proyek/perencana datang kepada masyarakat sudah membawa rencana program, dan yang diharapkan dari masyarakat adalah respon atau tanggapan serta masukan/saran sehubungan dengan rencana pelaksanaan program tersebut.

Nilai 4 = bentuk partisipasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana tindak, seperti kesepakatan/keterlibatan dalam pengambilan keputusan tetapi pihak pengelola proyek sudah membawa rencana program sedangkan usulan/saran dari masyarakat tidak mempengaruhi hasil.

- Nilai 5 = bentuk partisipasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana tindak, tetapi hanya sedikit usulan/saran yang dilaksanakan.
- Nilai 6 = bentuk partisipasi yang dapat menimbulkan rasa kepedulian dan rasa memiliki atas prasarana yang dibangun, seperti sumbangan tenaga pada tahap pelaksanaan.
- Nilai 7 = bentuk partisipasi yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mewujudkan suatu kepedulian terhadap kondisi lingkungan permukiman, yang dapat memberikan pengaruh cukup besar bagi kelancaran kegiatan pembangunan dalam pengelolaan sarana air minum dan pendistribusian air secara perpipaan, seperti sumbangan tenaga dan bahan/material pada tahap pelaksanaan.
- Nilai 8 = bentuk partisipasi yang diberikan dapat meningkatkan target/sasaran fisik sehingga dampaknya dapat mengoptimalkan fungsi prasarana yang dibangun, seperti sumbangan dana pada tahap pemeliharaan.

Kajian tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Bulukumba dilihat dari 5 variabel yang akan diteliti meliputi partisipasi dalam bentuk harta benda, tenaga, keterampilan, buah pemikiran dan partisipasi sosial.

Dengan menggunakan jenjang peran serta yang ditulis oleh Arnstein (1969), dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Nilai terendah adalah $5 \times 60 = 300$ yaitu variable dikalikan jumlah sampel dan nilai tertinggi adalah $5 \times 8 \times 60 = 2400$ yaitu variable dikalikan tingkatan partisipasi dari teori Arnstein sebanyak 8 tingkat lalu dikalikan jumlah sampel. Apabila terdapat 8 interval maka jarak intervalnya adalah $4800-600/8 = 262$. Maka untuk skor tingkatan partisipasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penentuan Skor Pada Tingkatan Partisipasi

Tingkat Partisipasi	Skor
Citizen control	2138 - 2400
Delegated Power	1876 - 2137
Partnership	1613 - 1875
Placation	1351 - 1612
Consultation	1088 - 1350
Informing	826-1087
Therapy	563 - 825
Manipulation	300 - 562

- c. Metode untuk mengetahui hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam mengamati hasil survey primer yang di lapangan dilakukan dengan menggunakan model tabulasi silang atau crosstab untuk menghitung kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel atau lebih. Penggunaan

Chi Square terutama untuk mengetahui variabel yang memiliki keterkaitan dengan responden untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel tersebut. Setelah dilakukan uji chi square maka langkah selanjutnya adalah melihat taraf signifikansi (C). Nilai taraf signifikansi yang dihasilkan menunjukkan bahwa ada atau tidak hubungan antara dua variabel yang diuji. (Schuebeler, 1996).

Batas taraf signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah 5% artinya jika taraf signifikansi yang dihasilkan kurang dari 5% maka pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji saling berhubungan harus diterima, sebaliknya jika nilai tersebut lebih besar dari 5% maka kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus ditolak. Koefisien kontingensi menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel yang diuji, nilai koefisien kontingensi ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00 di mana hasil koefisien kontingensi mendekati 1, maka hubungan antara kedua variabel tersebut sangat kuat dan sebaliknya jika nilai kontingensi tersebut semakin mendekati 0 maka hubungan antara kedua variabel tersebut semakin lemah. Pengujian yang dilakukan bersifat pendekatan. Frekuensi yang diharapkan terjadi akan dinyatakan dengan e_{ij} , yang di hitung dengan menggunakan program olah data statistik SPSS.

Analisis regresi sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variable independen (X) dengan variable dependen (Y). dngan persamaan umum yaitu:

$$Y = a + b X$$

Berikut ini variabel yang akan diuji regresi sederhana yaitu variabel jenis kelamin terhadap partisipasi masyarakat, umur terhadap partisipasi masyarakat, pendidikan terhadap partisipasi masyarakat, pekerjaan terhadap partisipasi masyarakat, yang di hitung dengan menggunakan program SPSS.

Analisis regresi berganda. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent jenis kelamin (X_1), umur (X_2), pendidikan(X_3) , pekerjaan (X_4), penghasilan (X_5), dan lama tinggal (X_6) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen partisipasi masyarakat. Dengan persamaan umumnya yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_6X_6$$

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

DESA MATTOANGING

Desa Mattoanging merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kajang yang dulu termasuk kedalam wilayah desa Possi Tanah yang dimekarkan menjadi empat wilayah. Jarak tempuh dari ibukota kabupaten ke wilayah desa Mattoanging adalah 64 km, sedang jarak tempuh ke ibukota kecamatan ke desa Mattoanging 13 km. Desa Mattoanging termasuk wilayah kecamatan Kajang yang mempunyai luas wilayah sebesar 440 Ha/M² yang diapit oleh beberapa desa yaitu bahagian sebelah barat terdapat desa Malleleng kecamatan Kajang, sebelah timur adalah desa Possi tanah kecamatan Kajang, sebelah Selatan terdapat desa Lembanna kecamatan Kajang dan bahagian sebelah utara yakni desa Lolisang kecamatan Kajang. Sementara dalam desa Mattoanging, pembagian wilayah dusun dibagi dalam enam wilayah yakni dusun Tabbuakang yang merupakan ibukota desa Mattoanging, dusun Maccini, dusun Bonto Didi, dusun Batu Putih, dusun Patikoro dan dusun Tocidu. Desa Mattoanging memiliki jumlah penduduk sebesar 1999 jiwa, yang terdiri dari 545 kk (kepala keluarga), jumlah laki-laki sebesar 965 jiwa dan perempuan sebesar 1034 jiwa.

Desa Mattoanging memiliki jumlah bulan hujan sebanyak empat bulan, suhu rata-rata 22 °C dan terletak diatas ketinggian permukaan laut setinggi 123 mdl.

Situasi dan kondisi suatu daerah dapat berperan terhadap masyarakat untuk bekerja sesuai dengan potensi yang ada pada daerah tersebut, seperti halnya dengan masyarakat pada desa Mattoanging. Nampak jelas kehidupan sehari-hari yang dominan mata pencaharian penduduk merupakan petani, wiraswasta dan lain sebagainya.

Potensi umum lainnya seperti luas wilayah menurut penggunaan yang terdiri dari luas pemukiman 145 ha/m², luas persawahan 76,3 ha/m², luas perkebunan 93,7 ha/m², luas pekarangan 118 ha/m², luas perkantoran 2 ha/m², dan luas pekuburan sebesar 5 ha/m². Total luas wilayah menurut penggunaan sebesar 440 ha/m².

Sementara penggunaan luas tanah sawah tadah hujan sebesar 76,3 ha/m², tanah kering berupa pemukiman 145 ha/m² dan pekarangan 118 ha/m². Tanah perkebunan berupa tanah perkebunan swasta sebesar 93,7 ha/m², tanah perkebunan perorangan 43,7 ha/m².

Lahan pemilikan disektor pertanian dengan jumlah keluarga memiliki tanah pertanian yakni 275 keluarga, tidak memiliki 324 keluarga, memiliki kurang 1 ha sebesar 180 keluarga, memiliki 1,0 – 5,0 ha sebesar 95 keluarga. Total keluarga petani 275 keluarga.

Potensi sumber daya air pada potensi air dan sumber daya air di desa Mattoanging berupa sungai dan mata air dengan debit kecil dan sedang, adapun sumber air bersih berupa mata air berjumlah tiga sumber memiliki kualitas air baik dengan pemanfaat sebesar 125 kepala keluarga dengan kondisi baik, sumur gali berjumlah 35 sumber memiliki kualitas air baik dengan pemanfaat 250 kepala keluarga dengan kondisi rusak.

Sumber daya air yang ada di desa Mattoanging berupa sungai berjumlah satu sumber dengan keadaan tidak tercemar, namun memiliki pendangkalan atau pengendapan lumpur tinggi sehingga mengakibatkan sumber air sungai tersebut jadi keruh dan tidak memenuhi baku mutu air, berkurangnya biota sungai dan sungai jadi kering.

KELURAHAN SAPOLOHE

Kelurahan Sapolohe mempunyai luas wilayah 7 Km², kelurahan Sapolohe merupakan daerah yang berada pada tinggian yang rendah dengan jumlah penduduk 5426 jiwa yang terdiri dari 2297 jiwa laki-laki dan 3129 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1765 KK. Adapun lingkungan yang mendapatkan program PAMSIMAS yakni lingkungan Sapolohe dengan jumlah jiwa sebesar 1237 jiwa.

Kelurahan Sapolohe terdiri dari tiga lingkungan yakni lingkungan Sapolohe, lingkungan Pasaraya Lama dan lingkungan Pasaraya Baru yang terdiri dari 6 RW/RK dan 12 RT. Kelurahan Sapolohe berbatasan dengan

kelurahan Benjala disebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Tanah Beru, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan sebelah timur berbatsan dengan kecamatan Ujung Loe.

Kelurahan Sapolohe memiliki jumlah bulan hujan sebanyak enam bulan, suhu rata-rata 100 °C dan terletak diatas ketinggian permukaan laut 10 mdl. Jarak tempuh dari ibukota kecamatan yakni tiga Km dengan jarak tempuh dengan kendaran bermotor selama lima menit. Jarak ke ibukota kabupaten/kota sejauh 26 Km dengan jarak tempuh kendaran bermotor satu jam dan jarak ke ibukota provinsi 182 Km, lama jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor selama empat jam.

Potensi umum lainnya pada kelurahan Sapolohe berupa luas lahan menurut penggunaan yakni luas pemukiman sebesar 0,2 ha/m², luas perkebunan 0,3 ha/m², luas pekarangan 6 m², luas taman 336 m², luas perkantoran 624 m², luas prasana umum lainnya 554 m². Total luas penggunaan lahan 0,7 ha/m². Penggunaan tanah kering berupa tegal atau lading sebesar 0,3 ha/m², pemukiman 0,2 ha/m² dan pekarangan 486 m². Penggunaan lahan tanah perkebunan perorangan sebesar 0,3 ha/m².

Pada sektor pertanian jumlah kepemilikan lahan pertanian sebanyak 534 keluarga, yang tidak memiliki sebanyak 1104 keluarga, dan pemilikan kurang dari satu Ha sebanyak 127 keluarga.

Potensi sumber daya air di kelurahan Sapolohe berupa sungai berdebit sedang, danau berdebit kecil dan mata air berdebit besar. Adapun sumber air bersih untuk kelurahan Sapolohe berupa sumur gali dan pipa dengan kondisi baik.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Program

PAMSIMAS adalah program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan umum PAMSIMAS secara umum adalah meningkatkan akses pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan dan daerah pinggiran kota (*peri urban*) serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat. Program ini akan menjadi model untuk direplikasi, diperluas (*scaling up*) dan diarusutamakan (*mainstreaming*) di daerah lain, dalam upaya mencapai target MDGs.

Di sisi lain Program Pamsimas ini memiliki keunikan tersendiri dengan pendekatan berbasis tupoksi (tugas pokok dan fungsi), sehingga Program Pamsimas dikelola oleh inter Departemen yaitu BAPPENAS, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan dan Departemen Pekerjaan Umum,

sedangkan di tingkat desa/kelurahan program ini menganut pendekatan berbasis masyarakat dimana masyarakatlah pelaku utama pembangunan.

Kegiatan program PAMSIMAS terkhusus di Kabupaten Bulukumba telah mencapai 52 Desa/Kelurahan di sepuluh kecamatan. Tujuan Program Pamsimas adalah terciptanya masyarakat hidup bersih dan sehat melalui peningkatan akses masyarakat miskin pedesaan dan pinggiran kota terhadap pelayanan air minum dan sanitasi.

Secara rinci program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat; meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kelembagaan lokal dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Sasaran Program adalah terutama kelompok miskin di pedesaan dan pinggiran kota yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi dan terbangun budaya bersih dan sehat.

1. Strategi dan Pendekatan

Untuk mencapai tujuan program Pamsimas strategi dasar yang diterapkan adalah melalui pembangunan pelayanan air minum dan sanitasi

dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utama agar tercipta budaya hidup bersih dan sehat. Strategi tersebut dilakukan dengan prinsip dan pendekatan sebagai berikut : Berbasis Masyarakat, Partisipatif, Tanggap Kebutuhan, Kesetaraan Gender, Keberpihakan pada Masyarakat Miskin, Keberlanjutan, Transparansi dan Akuntabilitas, Berbasis Nilai.

2. Organisasi Pelaksanaan Program

Organisasi pelaksana dibentuk disetiap tingkatan (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan) untuk mendukung pelaksanaan program Pamsimas. Pelaku program di setiap tingkatan memiliki tanggung jawab sesuai peran dan fungsinya. Adapun uraian pelaku program Pamsimas antara lain : Tingkat Desa dan Masyarakat yakni Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Tingkat Kecamatan yaitu Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Teknis Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota yaitu Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Kota), Tim Koordinasi Kaupaten/Kota, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Unit Pengelola Program Kabupaten/Kota (DPMU), Satuan Kerja (Satker) Kabupaten/Kota, District Management and Advisory Consultant (DMAC – WSS, HH, CD).

3. Tahap Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dana untuk membiayai kegiatan Pamsimas yang telah dituangkan dalam RKM atau Rencana Kegiatan Masyarakat yang bersumber dari:

- 1) Kontribusi masyarakat sebesar minimal 20 % (berbentuk *in-cash* minimal 4% dan *in-kind* minimal 16%);
- 2) Dana BLM dari APBD dalam bentuk DDUPB (Dana Daerah untuk Program Bersama) minimal 10%; dan
- 3) Dana BLM dari APBN sebesar 70%.

4. Implementasi Fisik Program

Menyediakan pilihan teknis kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana air minum dan sanitasi umum. Sesuai dengan kebijakan umum AMPL Berbasis Masyarakat, maka pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, menggunakan pendekatan tanggap kebutuhan. Sarana dan prasarana yang akan dibangun didasarkan pada usulan yang diajukan dan disepakati oleh masyarakat yang dilakukan secara partisipatif melalui usulan desa yang disetujui oleh forum institusi warga tingkat desa. Masyarakat sendiri yang akan mengambil keputusan, baik dalam hal pemilihan sistem yang akan dibangun, pola pendanaan, maupun tata cara pengelolaannya. Pemerintah akan mengucurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 70% (dari Rp

275 juta) dari kebutuhan dana untuk pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Dana BLM tersebut termasuk untuk kegiatan perubahan perilaku higiene masyarakat, kegiatan higiene dan kesehatan berbasis sekolah, dan pendidikan *hygiene teaching*. Fasilitas sanitasi akan dibangun di sekolah-sekolah di masyarakat partisan yang membutuhkan. Tidak hanya dana, masyarakat juga akan diberikan bantuan perencanaan dan dukungan teknik. Bantuan ini meliputi : [i] *Rapid Technical Assessment* (RTA) dan *Community WSS situation analysis* (MPAPHAST) untuk menentukan kebutuhan air dan pilihan-pilihan sistem; [ii] Pilihan teknologi sistem air minum; [iii] Survei teknik dan penyusunan Rancangan. Rinci Kegiatan (RRK); [iv] Konstruksi, supervisi dan *quality control*; [v] Pelatihan O&M mencakup manajemen, teknik dan ketrampilan pembiayaan yang dibutuhkan bagi keberlanjutan sistem; dan [vi] Monitoring kualitas air minum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak penyediaan air minum yang aman dan baik untuk penyimpanan dan minum.

5. Implementasi Program Pamsimas

Pelaksanaan program Pamsimas menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metoda MPA/PHAST. Pendekatan metoda ini menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Metoda ini pada dasarnya menitik beratkan pada pelibatan seluruh masyarakat (laki-laki - perempuan,

kaya – miskin, tua - muda) dalam seluruh proses kegiatan; mulai dari identifikasi masalah dan analisa situasi, perumusan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan sarana serta monitoring dan evaluasi. MPA (*Methodology for Participatory Assessments*) digunakan sebagai pendekatan dalam membuat rencana di tingkat masyarakat, khususnya pada penilaian kebutuhan terhadap sarana air minum dan sanitasi. Sedangkan PHAST (*Participatory Hygiene And Sanitation Transformation*) digunakan dalam menyusun rencana kerja khususnya dalam melakukan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat dan sekolah.

A. Karakteristik Responden

Desa Mattoanging

Bagian ini akan menampilkan data tentang identitas responden yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lamanya tinggal. Data diperlukan dalam mendukung validitas dan analisa data penelitian, sehingga kesimpulan yang ditarik diharapkan dapat merepresentasi keadaan populasinya.

1. Jenis Kelamin

Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat baik yang berjenis laki-laki dan

perempuan terhadap pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan di Dasa Mattoangin. Berikut hasil analisis data di sajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi responden menurut jenis kelamin di daerah penelitian

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	37	61,7
2	Perempuan	23	38,3
Jumlah		60	100

Sumber data : Hasil analisis data primer, 2013

Pada Tabel 3 terlihat bahwa responden dominan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 37 jiwa atau 61,7% dari jumlah responden yang ada dalam penelitian ini menunjukkan kaum laki-laki lebih banyak memiliki peranan dibandingkan dengan kaum wanita. Dan hasil dari kelompok perempuan yang 23 orang atau 38,3% ini menggambarkan keikutsertaan perempuan telah memenuhi kebutuhan program dan pelibatan perempuan dalam pembangunan yakni minimal sebesar 30% dari jumlah peserta atau jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan.

2. Pekerjaan

Pekerjaan atau mata pencaharian suatu masyarakat adalah aspek yang dapat menjadi ukuran pendapatan bagi seseorang. Semakin baik mata pencaharian seseorang, memungkinkan orang tersebut untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik demikian pula sebaliknya, apabila mata

pencapaian kurang baik memungkinkan tingkat pendapatan yang diperoleh lebih sedikit. Adapun Pekerjaan responden sebagai berikut :

Tabel 4. Distribusi responden menurut pekerjaan di daerah penelitian

No	Pekerjaan	Jumlah	
		Responden (orang)	Persentase (%)
1	Petani	23	38,3
2	Tukang/buruh	2	3,3
3	Wiraswasta	10	16,7
4	Kader Desa	1	1,7
5	URT	16	26,7
6	ABRI/Polisi	1	1,7
7	Perangkat Desa	2	3,3
8	PNS	5	8,3
Jumlah		60	100

Sumber data : Hasil analisis data primer, 2013.

3. Penghasilan

Penghasilan merupakan hasil berupa uang yang diperoleh seseorang dari pekerjaan yang ditekuninya. Dengan demikian tinggi rendahnya pendapatan responden berhubungan erat dengan jenis pekerjaan yang ditekuninya. Dalam penelitian ini jumlah pendapatan responden perbulan dikelompokkan menjadi lima tingkatan, yaitu sangat rendah antara Rp 100.000 hingga Rp 700.000 atau sekitar 56,7%. Rendah antara Rp 800.000 hingga Rp 1.500.000 atau 21,7% selanjutnya kelompok sedang Rp 1.600.000 hingga Rp 2.300.000 atau 5%. Kelompok tinggi antara Rp 2.400.000 hingga

Rp 3.100.000 atau 15,0% dan kelompok sangat tinggi Rp 4.000.000 hingga Rp 4.700.000 atau 1,7%.

Pola penyebaran responden menurut tingkat pendapatan perbulan disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 5. Distribusi responden menurut jumlah penghasilan di daerah penelitian

No	Tingkatan Pendapatan (Rp)	Jumlah	
		Responden (orang)	Persentase (%)
1	100.000 - 700.000	34	56,7
2	800.000 - 1.500.000	13	21,7
3	1.600.000 - 2.300.000	3	5,0
4	2.400.000 - 3.100.000	9	15,0
5	4.000.000 - 4.700.000	1	1,7
Jumlah		60	100

Sumber : Hasil analisis data primer, 2013.

4. Umur/Usia

Umur merupakan salah satu faktor yang penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba. Umur seseorang merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan dalam kegiatan mencari nafkah disamping berbagai faktor lainnya, sehingga ada kecenderungan semakin tinggi umur seseorang kemampuan untuk mencari nafkah atau melakukan kegiatan sesuatu usaha semakin rendah. Oleh karena semakin tua seseorang maka kekuatan fisiknya semakin menurun. Umur responden yang terlibat dalam penelitian ini

berkisar antara 25 tahun sampai 60 tahun dimana kelompok usia responden yang berumur 25 tahun hingga 36 tahun sebanyak 22 orang atau 36,7%. Kelompok usia 37 tahun hingga 54 tahun sebanyak 32 orang atau 53,3%. Dan jumlah responden yang paling sedikit adalah kelompok usia 55 hingga 60 tahun sebanyak 6 orang atau 10%. Di tinjau dari segi tenaga kerja maka sebaran umur responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya responden masih tergolong pada usia produktif, sehingga responden yang berada pada kelompok yang masih produktif mereka sangat berpotensi untuk memberikan partisipasinya dalam program partisipasi, khususnya program WSLIC-III/PAMSIMAS.

Tabel 6. Distribusi responden menurut kelompok umur di daerah penelitian

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	25 - 36	22	36,7
2	37 - 54	32	53,3
3	55 - 60	6	10,0
Jumlah		60	100

Sumber : Hasil analisis data primer, 2013.

5. Lamanya Tinggal

Tabel 7. Distribusi responden menurut lamanya tinggal di daerah penelitian

No	Lama Tinggal (tahun)	Jumlah	
		Responden (orang)	Presentase (%)
1	5 - 15	10	16,7
2	16 - 26	12	20,0
3	27 - 37	15	25
4	38 - 48	13	21,7
5	49 - 59	9	15
6	60 - 70	1	1,7
Jumlah		60	100

Sumber data : Hasil analisis data primer, 2013

Dilihat dari Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa pada umumnya sebahagian besar responden yang ada di daerah penelitian ini sama dengan umur responden itu sendiri. Hal ini berarti penduduk yang tinggal di daerah penelitian tersebut umumnya merupakan penduduk asli dan hanya sedikit yang pendatang dari luar.

6. Pendidikan

Tingkat pendidikan dalam hubungannya dengan pola pikir, sikap dan prilaku manusia dalam aktifitas sehari-hari, maka tingkat pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu indikator yang sangat menentukan, tingkat pendidikan masyarakat atau seseorang sangat mempengaruhi tingkat penerimaannya terhadap motivasi dan inovasi dalam rangka melakukan pelaksanaan program.

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang diikuti oleh responden. Pentingnya identitas pendidikan bagi responden, agar dapat mengukur pengetahuan, sikap dan perilaku responden dalam berintegrasi dengan lingkungannya. Dengan demikian tinggi rendahnya partisipasi dalam kegiatan program WSLIC-III/PAMSIMAS di duga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang diperolehnya. Adapun distribusi responden menurut tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Distribusi responden tingkat pendidikan di daerah penelitian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Responden (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	12	20
2	SD	14	23,3
3	SLTP	15	25,0
4	SMU	11	18,3
5	D2	2	3,3
6	S1	5	8,3
7	S2	1	1,7
Jumlah		60	100

Sumber : Hasil analisis data primer (2013)

Dari data Tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) yakni sebanyak 14 responden atau 23,3%. Berikutnya tingkat pendidikan pada tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) berada pada urutan kedua yakni sebanyak 15 responden atau sebesar 25,0%. Tingkat pendidikan sekolah menengah

umum (SMU) sebanyak 11 responden atau 18,3%. Diplolam Dua sebanyak 2 responden atau 3,3%, selanjutnya Strata Satu (S1) sebanyak 5 responden atau 8,3% dan Strata Dua sebanyak 1 responden atau 1,7%.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan dapat mempengaruhi pandangan sikap (persepsi), dan perilaku seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain dan cepat tanggap terhadap inovasi. Diasumsikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima inovasi dan menyadari serta tanggap pula terhadap fenomena-fenomena baru yang terjadi dilingkungan sekitarnya untuk lebih mudah menganalisisnya lebih cepat dan mudah termotivasi untuk melakukan pengembangan suatu usaha yang digelutinya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih relative rendah, tingkat pendidikan mempunyai pengaruh bagi masyarakat dalam mengadopsi teknologi dan keterampilan manajemen dalam mengelola usahanya termasuk pemanfaatan potensi yang dimilikinya.

KELURAHAN SAPOLOHE

1. Jenis Kelamin

Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat baik yang berjenis laki-laki dan perempuan terhadap pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan di Kab. Bulukumba. Berikut hasil analisis data di sajikan pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Distribusi responden menurut jenis kelamin di daerah penelitian

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	36	60,0
2	Perempuan	24	40,0
Jumlah		60	100

Sumber data : Hasil analisis data primer, 2013

Pada Tabel 9 terlihat bahwa responden dominan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang atau 60,0% dari jumlah responden yang ada dalam penelitian ini menunjukkan kaum laki-laki lebih banyak memiliki peranan dibandingkan dengan kaum wanita. Dan hasil dari kelompok perempuan yang ikut berpartisipasi yaitu 24 orang atau 40% ini menggambarkan keikutsertaan perempuan telah memenuhi kebutuhan program dan pelibatan perempuan dalam pembangunan yakni minimal sebesar 30% dari jumlah

peserta atau jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan.

2. Pekerjaan

Pekerjaan atau mata pencaharian suatu masyarakat adalah aspek yang dapat menjadi ukuran pendapatan bagi seseorang. Untuk Kelurahan Sapolohe jenis matapencaharian penduduk yang dominan yaitu wiraswasta yaitu sebanyak 28 orang atau 46,7%, sebagian kecil sebagai buruh yaitu 1 orang atau 1,7% dari 60 responden. Adapun Pekerjaan responden sebagai berikut :

Tabel 10. Distribusi responden menurut pekerjaan di daerah penelitian

No	Pekerjaan	Jumlah	
		Responden (orang)	Persentase (%)
1	Petani	8	13,3
2	Tukang/buruh	1	1,7
3	Wiraswasta	28	46,7
4	Kader Desa	0	0
5	URT	12	20,0
6	ABRI/Polisi	0	0
7	Perangkat Desa	0	0
8	PNS	11	18,3
Jumlah		60	100

Sumber data : Hasil analisis data primer, 2013.

3. Penghasilan

Penghasilan merupakan hasil berupa uang yang diperoleh seseorang dari pekerjaan yang ditekuninya. Dengan demikian tinggi rendahnya pendapatan responden berhubungan erat dengan jenis pekerjaan yang

ditekuninya. Dalam penelitian ini jumlah pendapatan responden perbulan dikelompokkan menjadi lima tingkatan, yaitu sangat rendah antara Rp 100.000 hingga Rp 700.000 atau sekitar 66,7%. Rendah antara Rp 800.000 hingga Rp 1.500.000 atau 32,7% selanjutnya kelompok sedang Rp 1.600.000 hingga Rp 2.300.000 atau 6,7%. Kelompok sangat tinggi Rp 4.000.000 hingga Rp 4.700.000 atau 5,0%.

Pola penyebaran responden menurut tingkat pendapatan perbulan disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 11. Distribusi responden menurut jumlah penghasilan di daerah penelitian

No	Tingkatan Pendapatan (Rp)	Jumlah	
		Responden (orang)	Persentase (%)
1	100.000 - 700.000	40	66,7
2	800.000 - 1.500.000	13	21,7
3	1.600.000 - 2.300.000	4	6,7
4	2.400.000 - 3.100.000	0	0
5	4.000.000 - 4.700.000	3	5,0
Jumlah		60	100

Sumber : Hasil analisis data primer, 2013.

4. Umur/Usia

Umur merupakan salah satu faktor yang penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba. Umur seseorang merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan dalam kegiatan mencari nafkah disamping berbagai faktor

lainnya, sehingga ada kecenderungan semakin tinggi umur seseorang kemampuan untuk mencari nafkah atau melakukan kegiatan sesuatu usaha semakin rendah. Oleh karena semakin tua seseorang maka kekuatan fisiknya semakin menurun. Umur responden yang terlibat dalam penelitian ini berkisar antara 25 tahun sampai 60 tahun dimana kelompok usia responden yang berumur 25 tahun hingga 36 tahun sebanyak 13 orang atau 21,7%. Kelompok usia 37 tahun hingga 54 tahun sebanyak 30 orang atau 50%. Dan jumlah responden yang paling sedikit adalah kelompok usia 55 hingga 60 tahun sebanyak 16 orang atau 28,3%. Di tinjau dari segi tenaga kerja maka sebaran umur responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya responden masih tergolong pada usia produktif, sehingga responden yang berada pada kelompok yang masih produktif mereka sangat berpotensi untuk memberikan partisipasinya dalam program partisipasi, khususnya program WSLIC-III/PAMSIMAS.

Tabel 12. Distribusi responden menurut kelompok umur di daerah penelitian

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	25 - 36	13	21,7
2	37 - 54	30	50
3	55 - 60	16	28,3
Jumlah		60	100

Sumber : Hasil analisis data primer, 2013.

5. Lamanya Tinggal

Tabel 13. Distribusi responden menurut lamanya tinggal di daerah penelitian

No	Lama Tinggal (tahun)	Jumlah	
		Responden (orang)	Presentase (%)
1	5 - 15	2	3,3
2	16 - 26	9	15,0
3	27 - 37	15	25,0
4	38 - 48	14	23,3
5	49 - 59	9	15,0
6	60 - 70	11	18,3
Jumlah		60	100

Sumber data : Hasil analisis data primer, 2013

Dilihat dari Tabel 13 diatas menunjukkan bahwa pada umumnya sebahagian besar responden yang ada di daerah penelitian ini sama dengan umur responden itu sendiri. Hal ini berarti penduduk yang tinggal di daerah penelitian tersebut umumnya merupakan penduduk asli dan hanya sedikit yang pendatang dari luar.

6. Pendidikan

Tingkat pendidikan dalam hubungannya dengan pola pikir, sikap dan prilaku manusia dalam aktifitas sehari-hari, maka tingkat pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu indikator yang sangat menentukan, tingkat pendidikan masyarakat atau seseorang sangat mempengaruhi tingkat penerimaannya terhadap motivasi dan inovasi dalam rangka melakukan pelaksanaan program.

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang diikuti oleh responden. Pentingnya identitas pendidikan bagi responden, agar dapat mengukur pengetahuan, sikap dan perilaku responden dalam berintegrasi dengan lingkungannya. Dengan demikian tinggi rendahnya partisipasi dalam kegiatan program WSLIC-III/PAMSIMAS di duga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang diperolehnya. Adapun distribusi responden menurut tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 14, berikut ini.

Tabel 14. Distribusi responden tingkat pendidikan di daerah penelitian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Responden (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	9	15,0
2	SD	18	30
3	SLTP	10	16,7
4	SMU	13	21,7
5	D2	1	1,7
6	D3	4	6,7
7	S1	4	6,7
8	S2	1	1,7
Jumlah		60	100

Sumber : Hasil analisis data primer (2013)

Dari data Tabel 14 di atas, menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) yakni sebanyak 18 responden atau 30%. Berikutnya tingkat pendidikan pada tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) berada pada urutan kedua yakni sebanyak 10 responden atau sebesar 16,7%. Tingkat pendidikan sekolah menengah

umum (SMU) sebanyak 13 responden atau 21,7%. Diplolam Dua sebanyak 1 responden atau 1,7%. Diploma Tiga sebanyak 4 responden atau 6,7% selanjutnya Strata Satu (S1) sebanyak 4 responden atau 6,7% dan Strata Dua sebanyak 1 responden atau 1,7%.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan dapat mempengaruhi pandangan sikap (persepsi), dan perilaku seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain dan cepat tanggap terhadap inovasi. Diasumsikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima inovasi dan menyadari serta tanggap pula terhadap fenomena-fenomena baru yang terjadi dilingkungan sekitarnya untuk lebih mudah menganalisisnya lebih cepat dan mudah termotivasi untuk melakukan pengembangan suatu usaha yang digelutinya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih relative rendah, tingkat pendidikan mempunyai pengaruh bagi masyarakat dalam mengadopsi teknologi dan keterampilan manajemen dalam mengelola usahanya termasuk pemanfaatan potensi yang dimilikinya.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Berkelanjutan

1. Bentuk dan Tingkatan Partisipasi

Kajian tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Bulukumba dilihat dari 5 variabel yang akan diteliti meliputi partisipasi dalam bentuk harta benda, tenaga, keterampilan, buah pemikiran dan partisipasi sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Bulukumba dikelompokkan menjadi 8 (delapan) tingkatan partisipasi masyarakat.

Desa Mattoanging

Berikut ini disajikan hasil analisis wawancara yang dilakukan terhadap 60 responden di Desa Mattoanging tentang tingkatan dan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sarana air bersih.

Tabel 15. Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih di Desa Mattoanging.

No	Variabel	Deskripsi Partisipasi	Tingkat Partisipasi Menurut Amstein	Freq (F)	Skor (S)	F x S	Jml per Var
1	Harta	Menyumbang dan mampu mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan	Citizen control	4	8	32	
		Menyumbang dan memiliki kewenangan melaksanakan usulan dan pemafaatan dana dilapangan	Delegated power	8	7	56	
		Menyumbang dan mendapatkan pembagian tanggung jawab	Partnership	15	6	90	
		Menyumbang demi keberhasilan pelaksanaan program dilapangan	Placation	4	5	20	
		Menyumbang berdasarkan kemampuan dan pertimbangan manfaat	Consultation	2	4	8	
		Menyumbang karena menginginkan informasi	Informing	5	3	15	
		Meyumbang sekedar ikut-ikutan orang sekitar	Therapy	15	2	30	
		Menyumbang karena terpaksa	Manipulation	1	1	1	252
2	Tenaga	Terlibat dan mampu mengendalikan seluruh proses	Citizen control	4	8	32	
		Terlibat dan memiliki kewenangan melaksanakan usulan di lapangan	Delegated power	6	7	42	
		Terlibat dan mendapatkan pembagian tanggung jawab yang jelas	Partnership	12	6	72	
		Terlibat tapi hanya sedikit usulan dilaksanakan di lapangan	Placation	6	5	30	
		Terlibat dan berkesempatan menanyakan manfaat	Consultation	6	4	24	
		Terlibat dan berkesempatan menyampaikan usulan	Informing	8	3	24	
		Terlibat sekedar aja	Therapy	10	2	20	
		Terlibat karena terpaksa	Manipulation	8	1	8	252
3	Keterampilan	Terlibat dan mampu mengendalikan seluruh proses berdasarkan keahlian	Citizen control	4	8	32	
		Terlibat dan memiliki kewenangan melaksanakan usulan sesuai keahlian	Delegated power	8	7	56	
		Terlibat dan mendapatkan pembagian tanggung jawab yang jelas sesuai keahlian	Partnership	15	6	90	
		Terlibat tapi hanya sedikit usulan terlaksana akibat keterbatasan keterampilan khusus	Placation	7	5	35	
		Terlibat dan meminta petunjuk pengejaan sesuai keterampilan	Consultation	10	4	40	
		Terlibat dan berkesempatan menyampaikan usulan sesuai keahlian	Informing	6	3	18	
		Terlibat sekedar aja	Therapy	9	2	18	
Terlibat karena terpaksa	Manipulation	2	1	2	283		

Tabel 15. (Lanjutan)

No	Variabel	Deskripsi Partisipasi	Tingkat Partisipasi Menurut Arnstein	Freq (F)	Skor (S)	F x S	Jml per Var
4	Pemikiran	Menyampaikan ide-ide yang mampu mengendalikan seluruh program kegiatan	Citizen control	3	8	24	
		Melaksanakan ide-ide hasil kesepakatan untuk kesuksesan pelaksanaan program	Delegated power	11	7	77	
		Memberikan pemahaman tentang pembagian tanggung jawab yang jelas	Partnership	17	6	102	
		Mendiskripsikan kondisi lapangan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan program	Placation	2	5	10	
		Menerima dan mensosialisasikan ide-ide kepada masyarakat sekitar	Consultation	8	4	32	
		Memberikan informasi yang benar tentang waktu dan pelaksanaan program serta manfaatnya	Informing	8	3	24	
		Sekedar memberikan ide-ide	Therapy	9	2	18	
		Terpaksa memberikan ide-ide	Manipulation	2	1	2	289
5	Sosial	Mengawasi dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan	Citizen control	2	8	16	
		Mengontrol dan memberikan kewenangan pemanfaatan kepada masyarakat sekitar	Delegated power	12	7	84	
		Mengawasi pembagian pembagai tanggung jawab dan menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja	Partnership	12	6	72	
		Mengawasi demi keberhasilan pelaksanaan program dilapangan	Placation	5	5	25	
		Mengawasi dan membrikan pertimbangan dan dukungan demi keberhasilan program	Consultation	6	4	24	
		Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan pelaksana program	Informing	9	3	27	
		Mengawasi dan mengontrol hanya sekedar ikut-ikutan orang sekitar	Therapy	11	2	22	
		Mengawasi dan menjaga karena terpaksa	Manipulation	3	1	3	273
Total Skor							1349

Sumber: Data Primer di olah 2013

Berdasarkan hasil analisis data kuisisioner yang dilakukan di peroleh informasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sarana air bersih di Desa Mattoanging termasuk dalam tingkatan *Partnership* menurut klasifikasi tingkatan partisipasi menurut Arnstain dengan nilai skor 90. Artinya bentuk parisipasi harta benda masyarakat terhadap pengelolaan sarana air bersih di Desa Mattoanging dapat dijadikan sebagai partner dalam

mensukseskan program ini mulai dari tahap pelaksanaan sampai pada tahap pemeliharaan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga memiliki nilai skor 72 pada tingkatan partisipasi *Partnership*, Artinya partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga di Desa Mattoanging cukup tinggi yang tentunya dapat memperlancar pelaksanaan program pengelolaan air bersih. Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pencegahan dan pelestarian sumberdaya air.

Tingkat partisipasi dalam bentuk keterampilan terhadap pengelolaan sarana air bersih di Desa Mattoanging dari 60 responden memiliki nilai skor 90 termasuk pada tingkat partisipasi *Partnership*. Artinya bentuk peran serta masyarakat dalam bentuk keterampilan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mewujudkan suatu kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang dapat memberikan pengaruh cukup besar bagi kelancaran kegiatan pembangunan pengelolaan sarana air bersih secara berkelanjutan melalui ide kreativitas masyarakat bentuk keterampilan-keterampilan yang bermanfaat.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran terhadap pengelolaan sarana air bersih di Desa Mattoanging secara berkelanjutan memiliki skor 102 termasuk tingkat partisipasi *Partnership*. Partisipasi buah

pikiran merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik, yaitu bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pemeliharaan dan pelestarian sumberdaya air.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk sosial terhadap pengelolaan sarana air bersih di Desa Mattoanging secara berkelanjutan memiliki skor 72 termasuk pada tingkat *Partisipasi*. Karakteristik ekonomi, sosial dan budaya masyarakat diarahkan untuk menganalisis realitas yang menunjukkan pola hubungan dan tindakan yang dominan berpengaruh dalam kehidupan dan tingkat partisipasi masyarakat. Kondisi sosial masyarakat mengandung dimensi bahwa keadaan atau gambaran mengenai peran seseorang atau anggota masyarakat dalam berpartisipasi terhadap rencana pembangunan pengelolaan sarana air bersih di Desa Mattoanging.

Kelurahan Sapolohe

Berikut ini disajikan hasil analisis wawancara yang dilakukan terhadap 60 responden di Kelurahan Sapolohe tentang tingkatan dan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sarana air bersih.

Tabel 16. Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe.

No	Variabel	Deskripsi Partisipasi	Tingkat Partisipasi Menurut Amstein	Freq (F)	Skor (S)	F x S	Jml per Var
1	Harta	Menyumbang dan mampu mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan	Citizen control	0	8	0	
		Menyumbang dan memiliki kewenangan melaksanakan usulan dan pemafaatan dana dilapangan	Delegated power	17	7	119	
		Menyumbang dan mendapatkan pembagian tanggung jawab	Partnership	34	6	204	
		Menyumbang demi keberhasilan pelaksanaan program dilapangan	Placation	7	5	35	
		Menyumbang berdasarkan kemampuan dan pertimbangan manfaat	Consultation	0	4	0	
		Menyumbang karena menginginkan informasi	Informing	1	3	3	
		Meyumbang sekedar ikut-ikutan orang sekitar	Therapy	0	2	0	
		Menyumbang karena terpaksa	Manipulation	1	1	1	362
2	Tenaga	Terlibat dan mampu mengendalikan seluruh proses	Citizen control	0	8	0	
		Terlibat dan memiliki kewenangan melaksanakan usulan di lapangan	Delegated power	30	7	210	
		Terlibat dan mendapatkan pembagian tanggung jawab yang jelas	Partnership	23	6	138	
		Terlibat tapi hanya sedikit usulan dilaksanakan di lapangan	Placation	6	5	30	
		Terlibat dan berkesempatan menanyakan manfaat	Consultation	0	4	0	
		Terlibat dan berkesempatan menyampaikan usulan	Informing	0	3	0	
		Terlibat sekedar aja	Therapy	0	2	0	
		Terlibat karena terpaksa	Manipulation	1	1	1	379
3	Keterampilan	Terlibat dan mampu mengendalikan seluruh proses berdasarkan keahlian	Citizen control	1	8	8	
		Terlibat dan memiliki kewenangan melaksanakan usulan sesuai keahlian	Delegated power	29	7	203	
		Terlibat dan mendapatkan pembagian tanggung jawab yang jelas sesuai keahlian	Partnership	21	6	126	
		Terlibat tapi hanya sedikit usulan terlaksana akibat keterbatasan keterampilan khusus	Placation	9	5	45	
		Terlibat dan meminta petunjuk pengejaan sesuai keterampilan	Consultation	0	4	40	
		Terlibat dan berkesempatan menyampaikan usulan sesuai keahlian	Informing	0	3	18	
		Terlibat sekedar aja	Therapy	0	2	18	
Terlibat karena terpaksa	Manipulation	0	1	2	382		

Tabel 16. (Lanjutan)

No	Variabel	Deskripsi Partisipasi	Tingkat Partisipasi Menurut Amstein	Freq (F)	Skor (S)	F x S	Jml per Var
4	Pemikiran	Menyampaikan ide-ide yang mampu mengendalikan seluruh program kegiatan	Citizen control	1	8	8	
		Melaksanakan ide-ide hasil kesepakatan untuk kesuksesan pelaksanaan program	Delegated power	26	7	182	
		Memberikan pemahaman tentang pembagian tanggung jawab yang jelas	Partnership	28	6	168	
		Mendiskripsikan kondisi lapangan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan program	Placation	4	5	20	
		Menerima dan mensosialisasikan ide-ide kepada masyarakat sekitar	Consultation	1	4	4	
		Memberikan informasi yang benar tentang waktu dan pelaksanaan program serta manfaatnya	Informing	0	3	0	
		Sekedar memberikan ide-ide	Therapy	0	2	0	
		Terpaksa memberikan ide-ide	Manipulation	0	1	0	382
5	Sosial	Mengawasi dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan	Citizen control	1	8	8	
		Mengontrol dan memberikan kewenangan pemanfaatan kepada masyarakat sekitar	Delegated power	26	7	182	
		Mengawasi pembagian pembagai tanggung jawab dan menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja	Partnership	28	6	168	
		Mengawasi demi keberhasilan pelaksanaan program dilapangan	Placation	4	5	20	
		Mengawasi dan membrikan pertimbangan dan dukungan demi keberhasilan program	Consultation	0	4	0	
		Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan pelaksana program	Informing	0	3	0	
		Mengawasi dan mengontrol hanya sekedar ikut-ikutan orang sekitar	Therapy	0	2	0	
		Mengawasi dan menjaga karena terpaksa	Manipulation	4	1	4	382
Total Skor							1887

Tingkatan-tingkatan partisipasi masyarakat tersebut mulai dari yang terendah sampai pada tingkatan partisipasi tertinggi secara berurut yaitu *Manipulation* dengan skor nilai interval antara 300 – 562, *Therapy* dengan nilai interval 563 – 825, *Informing* dengan nilai interval 826 – 1087, *Consultation* dengan nilai interval 1088 – 1350, *Placation* nilai interval 1351 –

1612, *Partnership* nilai interval 1613 – 1875, *Delegated Power* nilai interval 1876 – 2137, *Citizen control* dengan nilai interval 2138 – 2400.

Berdasarkan hasil analisis data kuisioner yang dilakukan di peroleh informasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe termasuk dalam tingkatan *Partnership* menurut klasifikasi tingkatan partisipasi menurut Arnstain dengan nilai skor 204 sedangkan nilai akumulasi skor 362 yang berada pada interval skor 300 – 562 termasuk tingkat partisipasi *Manipulation*. Artinya bentuk partisipasi harta benda masyarakat terhadap pengelolaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe dapat menimbulkan rasa kepedulian dan rasa memiliki atas prasarana yang dibangun, seperti sumbangan iuran mulai dari tahap pelaksanaan sampai pada tahap pemeliharaan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga memiliki nilai skor 182 pada tingkatan partisipasi *Delegated Power*, sedangkan untuk nilai akumulasi variabel yaitu 379 yang terletak pada nilai interval 300 – 562 termasuk juga pada tingkatan partisipasi *Manipulation*. Artinya bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mewujudkan suatu kepedulian terhadap kondisi lingkungan permukiman, yang dapat memberikan pengaruh cukup besar bagi kelancaran kegiatan pembangunan dalam pengelolaan sarana air minum dan pendistribusian air

secara perpipaan, seperti sumbangan tenaga dan bahan/material pada tahap pelaksanaan.

Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau secara fisik dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pencegahan dan pelestarian sumberdaya air. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti reboisasi atau penghijauan, dan tindakan konservasi sumberdaya air lainnya, seperti pelestarian lingkungan, berteknik pertanian konservatif dan ramah lingkungan serta kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat.

Tingkat partisipasi dalam bentuk keterampilan terhadap pengelolaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe memiliki nilai skor 203 termasuk pada tingkat partisipasi *Delegated Power*, dan untuk nilai akumulasi skor 382 terletak pada nilai interval 300 – 562 termasuk pada tingkatan partisipasi *Manipulation*. Artinya bentuk peran serta yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mewujudkan suatu kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang dapat memberikan pengaruh cukup besar bagi kelancaran kegiatan pembangunan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran terhadap pengelolaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe secara berkelanjutan memiliki skor 182 termasuk tingkat partisipasi *Delegated Power* dan untuk nilai akumulasi skor 382 yang juga terletak pada nilai interval 300 – 562 termasuk

pada tingkatan partisipasi *Manipulation*. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik, yaitu bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pemeliharaan dan pelestarian sumberdaya air.

Partisipasi dapat di wujudkan pada berbagai macam kesempatan, seperti melalui pertemuan/rapat, melalui surat/saran dan tanggapan. Penyaluran ide-ide, gagasan dan sumbangan pemikirannya dapat di salurkan lewat lembaga-lembaga formal maupun nonformal yang ada. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Kelurahan Sapolohe dalam pemeliharaan dan pencegahan kerusakan sumberdaya air dalam bentuk Ide/gagasan, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran dalam pertemuan yang dilaksanakan lembaga-lembaga formal maupun nonformal.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk sosial terhadap pengelolaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe secara berkelanjutan memiliki skor 182 termasuk pada tingkat *Delegated Power*, untuk nilai akumulasi skor 644 yang juga terletak pada nilai interval 600-1125 termasuk pada tingkatan partisipasi *Manipulation*. Karakteristik ekonomi, sosial dan budaya masyarakat diarahkan untuk menganalisis realitas yang menunjukkan pola hubungan dan tindakan yang dominan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kondisi sosial dan budaya masyarakat mengandung dimensi

bahwa keadaan atau gambaran mengenai peran seseorang atau anggota masyarakat dalam melakukan aktivitasnya memenuhi kebutuhan hidup yang bersentuhan langsung dengan ekosistemnya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh faktor sosial yang akan mempengaruhi besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih di Desa Mattoanging secara berkelanjutan total skor adalah 1.349 yang termasuk dalam tingkat partisipasi *Placation* yang berkisar antara nilai interval 1351 – 1612. Sedangkan untuk Kelurahan Sapolohe total skor adalah 1.887 yang termasuk dalam tingkat partisipasi *Delegated Power* nilai interval 1876 – 2137. Artinya tingkat partisipasi terhadap pengelolaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe jauh lebih baik dari pada tingkat partisipasi di Desa Mattoanging, bentuk partisipasi yang dimaksud adalah berupa peran serta yang dapat menimbulkan rasa kepedulian dan rasa memiliki atas prasarana yang dibangun yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, seperti sumbangan iuran, tenaga, keterampilan, pemikiran dan sosial mulai dari tahap pelaksanaan sampai pada tahap pemeliharaan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam kategori Arnstain tingkat partisipasi yang terjadi yaitu termasuk kategori *Partnership*. Tahapan ini dipengaruhi oleh (1) hubungan yang sinergis antara anggota masyarakat sehingga masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sesuai dengan

peran dan posisi dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan; (2) kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjadi pendukung atas penyelenggaraan program pemerintah sehingga perlu diambil langkah yang tepat dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat; (3) pertimbangan latar belakang sosial budaya yaitu dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat perlu diberi kekuatan dan kemampuan dalam serangkaian tindakan/langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam penguasaan pengetahuan, sikap perilaku sadar dan keahlian keterampilan; (4) Masyarakat tidak diberikan kesempatan atau hak untuk mengungkapkan pendapat/ide karena dianggap tidak mempunyai kemampuan dan inisiatif merupakan pihak yang memerlukan bantuan sehingga kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya umpan balik kepada masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Bersih di Desa Mattoanging

Partisipasi masyarakat Desa Mattoanging dalam pelaksanaan program terlihat pada keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kabupaten Bulukumba adalah menyangkut partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam penerimaan manfaat dan partisipasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan. Tabel skoring Partisipasi responden dalam pengelolaan penyediaan sarana air bersih pada perencanaan, pelaksanaan, penerima

manfaat, dan monitoring dan evaluasi di desa Mattoanging disajikan pada Tabel berikut :

1. Partisipasi dalam Perencanaan Program

Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sarana air bersih di desa Mattoanging menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan berada pada kategori rendah sampai sedang sebesar 85,7% dan hanya 14,4% reponden yang mempunyai partisipasi kategori tinggi. Distribusi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sarana air bersih di desa Mattoanging disajikan pada Tabel 17 berikut:

Tabel 17 Distribusi Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan penyediaan sarana air bersih

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi					
		Rendah		Sedang		Tinggi	
		F	%	F	%	F	%
1	Kehadiran dalam penyusunan rencana kegiatan sarana air bersih	21	35	30	50	9	15
2	Mengetahui tentang rencana pengelolaan air bersih	33	55	16	26,7	11	18,3
3	Memahami rangkaian kegiatan pengelolaan air bersih	17	28,3	33	55,0	10	16,7
4	Aktif mengajukan saran dalam kegiatan pengelolaan air bersih	21	35	26	43,3	13	21,7
5	Mengajukan usul dalam diskusi rencana kegiatan pengelolaan air bersih	19	29,2	32	49,2	14	21,5
6	Ikut mengajukan usul dalam melestarikan sumber-sumber air bersih	27	45	30	50	3	5
7	Ikut memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan pengelolaan air bersih	19	32,8	39	67,2	0	0
8	Turut terlibat dalam pengambilan keputusan penting dalam pengelolaan air bersih	13	21,7	37	61,7	10	16,7
Rata-rata		21,3	35,3	30,4	50,4	8,8	14,4

Sumber : Data Primer 2013

Hasil wawancara terhadap responden menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi dalam kegiatan perencanaan disebabkan karena kegiatan perencanaan lebih banyak di dominasi oleh pihak pemerintah dalam hal ini KADES dan tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat. Kinerja perencanaan yang kurang partisipasi ini menimbulkan beberapa masalah misalnya: pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan terhadap pelaksanaan proyek akibat tidak maksimalnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan karena masyarakat

belum paham dengan maksud dan tujuan program dan menganggap program hanya milik orang perseorangan dan rendahnya factor pendidikan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Program

Dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan sarana air bersih sangat diperlukan, dan menjadi faktor penentu kelancaran dan keberhasilan kegiatan nantinya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan program pengelolaan sarana air bersih dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di desa Mattoanging tergolong tinggi sebesar 80,02%. Tingginya partisipasi responden ini memberi alasan bahwa masyarakat bertanggungjawab atas suksesnya program ini dan karena ada kebutuhan yang tinggi terhadap penyediaan sarana air bersih. Distribusi tingkat partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Desa Mattoanging disajikan pada Tabel 18 berikut:

Tabel 18 Distribusi Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pengelolaan penyediaan sarana air bersih.

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi					
		Rendah		Sedang		Tinggi	
		F	%	F	%	F	%
1	Pengawasan/Pemeliharaan terhadap sumber air bersih	7	11,7	27	45	26	43,3
2	Pengamanandalam pengelolaan penyediaan air bersih	9	15	21	35	30	50
3	Pengamanan jaringan sarana air bersih	14	23,3	9	15	37	61,7
4	Ikut berpartisipasi pada pelestarian sumber air bersih	19	31,7	31	51,7	10	16,7
5	Ikut serta dalam pembangunan jaringan air bersih	5	8,3	23	38,3	32	53,3
6	Ikut serta dalam menjaga kebersihan di sumber air bersih	12	20	21	35	27	45
7	Aktif dalam berorganisasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan penyediaan sarana air bersih	15	25	19	31,7	26	43,3
8	Ikut pelatihan-pelatihan guna meningkatkan SDM	19	31,7	20	33,3	21	35,0
	Rata-rata	12,5	20,8	21,4	35,6	26,1	43,5

Sumber : Data Primer 2013

Dampak kegiatan masyarakat yang mempunyai partisipasi tinggi dalam pelaksanaan pengelolaan sarana air bersih nampak pada masyarakat dalam membangun sarana yang telah direncanakan, berupa reservoir dan hidran umum, menyediakan galian pipa untuk transmisi dan distribusi air ke

rumah-rumah, menyediakan bahan-bahan material, uang serta tenaga, menjaga dan melindungi sumber air dari pencemaran dengan pembuatan SPAL atau saluran pembuangan air limbah yang tepat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian (12,5%) kelompok masyarakat yang tergolong berpartisipasi rendah dalam pelaksanaan pengelolaan sarana air bersih disebabkan karena mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan program oleh pihak pemerintah sehingga kurangnya semangat dalam melaksanakan program tersebut. Disamping itu juga terlihat bahwa kurangnya keaktifan dalam organisasi dalam pengelolaan sarana air bersih dan mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia.

3. Partisipasi dalam Penerima Manfaat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerimaan manfaat dari pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Desa Mattoanging tergolong tinggi (31,4%), sedang (24,3%) dan rendah (12,7%). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden pada program kegiatan pengelolaan penyediaan sarana air bersih memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat serta lingkungan pada umumnya. Distribusi tingkat Partisipasi masyarakat dalam penerimaan manfaat pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Desa Mattoanging disajikan pada Tabel 19 berikut:

Tabel 19. Distribusi tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penerimaan Manfaat Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Minum

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi					
		Rendah		Sedang		Tinggi	
		F	%	F	%	F	%
1	Manfaat dalam pemenuhan air bersih	16	27,1	19	32,2	25	40,7
2	Manfaat dalam fungsi lingkungan	19	31,7	19	31,7	22	36,7
3	Manfaat berkaitan dengan mata pencaharian dan pendapatan	11	19	20	33,3	29	48,3
Rata-rata		11,5	12,7	14,5	24,3	19,0	31,4

Sumber : Data Primer 2013

Umumnya responden yang mempunyai tingkat partisipasi tinggi disebabkan karena beberapa program yang telah dilaksanakan memberikan manfaat yang besar, misalnya pembangunan tempat penampungan air, dan pendistribusian air ke rumah-rumah. Sebelumnya masyarakat memanfaatkan beberapa sumber mata air untuk keperluan mereka sehari-hari. Masyarakat harus mengambil air dengan berjalan kaki namun dengan dibangunnya penampungan air dan adanya pendistribusian air ke rumah-rumah maka masyarakat dapat memperoleh air dengan mudah.

Adanya beberapa responden yang mempunyai tingkat Partisipasi rendah disebabkan karena tempat pembangunan penampungan air tersebut walaupun bermanfaat secara langsung namun mereka masih harus membayar kepada pengelolaan sarana tersebut.

4. Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi program sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang ditemui, faktor-faktor yang menjadi penghambat, dan bagaimana cara pemecahannya. Distribusi tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Desa Mattoanging disajikan pada Tabel 20 berikut :

Tabel 20. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan penyediaan Sarana Air Minum.

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi					
		Rendah		Sedang		Tinggi	
		F	%	F	%	F	%
1	Ikut terlibat dalam kegiatan Monev	29	48,8	19	31,7	12	20,0
2	Menghadiri pertemuan/rapat dalam kegiatan monev	31	51,7	22	36,7	7	11,7
3	Mengajukan usul/saran dalam rapat evaluasi	27	45	18	30	15	25
4	Memberikan laporan kemajuan kegiatan	30	50	21	35	9	15
Rata-rata		29,3	48,9	20	33,4	10,8	15,0

Sumber : Data Primer 2013

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Desa Mattoanging berada pada tingkat Partisipasi rendah (48,9%), sedang

(33,4%) dan tinggi (15,0%). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi disebabkan oleh pemahaman masyarakat bahwa kegiatan evaluasi merupakan pekerjaan pihak pemerintah (petugas yang berwenang) yang mempunyai kapasitas dalam program tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan komponen kegiatan yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat pelaksana program. Rekapitulasi Partisipasi responden sebagai variable dependen yang meliputi komponen perencanaan, pelaksanaan, penerima manfaat, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh disajikan pada Tabel 21 berikut:

Tabel 21. Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan penyediaan sarana air minum di desa Mattoanging.

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi					
		Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%
1	Perencanaan	21,3	35,3	30,4	50,4	8,8	14,4
2	Pelaksanaan	12,5	20,8	21,4	35,6	26,1	43,5
3	Penerimaan Manfaat	11,5	12,7	14,5	24,3	19,0	31,4
4	Monitoring dan Evaluasi	29,3	48,9	20	33,4	10,8	15

Sumber : Data Primer 2013

Berdasarkan Tabel 21 diatas terlihat bahwa Partisipasi dalam perencanaan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Desa Mattoanging tergolong rendah, partisipasi dalam pelaksanaan tergolong tinggi, Partisipasi dalam menerima manfaat tergolong tinggi dan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi tergolong rendah.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Bersih di Kelurahan Sapolohe

Keikutsertaan masyarakat Kelurahan Sapolohe dalam pelaksanaan program terlihat pada keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kabupaten Bulukumba adalah menyangkut partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam penerimaan manfaat dan partisipasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan.

1. Partisipasi dalam Perencanaan Program

Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe jauh lebih baik dari Desa Mattoanging menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan mendapat perhatian yang lebih baik dari masyarakat. Distribusi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe disajikan pada Tabel 22 berikut:

Tabel 22. Distribusi Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan penyediaan sarana air bersih

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi					
		Rendah		Sedang		Tinggi	
		F	%	F	%	F	%
1	Kehadiran dalam penyusunan rencana kegiatan sarana air bersih	31	51,7	20	33,3	9	15,0
2	Mengetahui tentang rencana pengelolaan air bersih	26	43,3	20	33,3	14	23,3
3	Memahami rangkaian kegiatan pengelolaan air bersih	23	38,3	18	30	19	31,7
4	Aktif mengajukan saran dalam kegiatan pengelolaan air bersih	29	48,3	17	28,3	14	23,3
5	Mengajukan usul dalam diskusi rencana kegiatan pengelolaan air bersih	22	36,7	20	33,3	18	30
6	Ikut mengajukan usul dalam melestarikan sumber-sumber air bersih	27	45	23	38,3	10	16,7
7	Ikut memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan pengelolaan air bersih	21	35	19	31,7	20	33,3
8	Turut terlibat dalam pengambilan keputusan penting dalam pengelolaan air bersih	24	40	18	30	18	30
Rata-rata		25,4	42,3	19,4	32,3	15,3	25,4

Sumber : Data Primer 2013

Hasil wawancara terhadap responden menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan berada pada kategori rendah (42,3%), sedang (32,3%), dan hanya (25,4%) reponden yang mempunyai partisipasi kategori tinggi. Tingginya tingkat partisipasi dalam kegiatan perencanaan disebabkan karena kegiatan perencanaan lebih

banyak melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat sangat membutuhkan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan air mereka, sehingga masyarakat menyambut dengan baik program ini.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe tergolong tinggi sebesar 40,8%. Tingginya partisipasi responden ini memberikan sebuah alasan bahwa kelestarian dan ketersediaan sumber air bersih tanggungjawab masyarakat karena ada ketergantungan yang tinggi terhadap sumber air bersih di Kelurahan Sapolohe. Distribusi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kel. Sapolohe di sajikan pada Tabel 23 berikut:

Tabel 23. Distribusi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi					
		Rendah		Sedang		Tinggi	
		F	%	F	%	F	%
1	Pengawasan/Pemeliharaan terhadap sumber air bersih	17	28,3	18	30	25	41,7
2	Pengamanan dalam kawasan pengelolaan air bersih	19	31,7	17	28,3	24	40
3	Pengamanan jaringan sarana air bersih	19	31,7	20	33,3	21	35
4	Ikut berpartisipasi pada pelestarian sumber air bersih	15	25	21	35	24	40
5	Ikut serta dalam pembangunan jaringan air bersih	11	18,3	23	38,3	26	43,3
6	Ikut serta dalam menjaga kebersihan di sumber air bersih	9	15	25	41,7	26	43,3
7	Aktif dalam berorganisasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan penyediaan sarana air bersih	18	30	20	33,3	22	36,7
8	Ikut pelatihan-pelatihan guna meningkatkan SDM	15	25	17	28,3	28	46,7
	Rata-rata	15,4	25,6	20,1	33,5	24,5	40,8

Sumber : Data Primer 2013

Dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan penyediaan sarana air bersih sangat diperlukan, dan menjadi faktor penentu kelancaran dan keberhasilan kegiatan nantinya. Untuk Kelurahan Sapolohe Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pelaksanaan program pengelolaan penyediaan sarana air bersih jauh lebih baik dari Desa Desa Mattoanging hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

3. Partisipasi dalam Penerima Manfaat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerimaan manfaat dari pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe tergolong tinggi (48,90%), sedang (31,67%) dan rendah (19,43%). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden pada program kegiatan pengelolaan penyediaan sarana air bersih memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat dan kelestarian sumber-sumber air bersih, hutan serta lingkungan pada umumnya. Distribusi tingkat Partisipasi masyarakat dalam penerimaan manfaat pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 24. Distribusi tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penerimaan Manfaat Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Bersih.

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi					
		Rendah		Sedang		Tinggi	
		F	%	F	%	F	%
1	Manfaat dalam pemenuhan air bersih	9	15	18	30	33	55
2	Manfaat dalam fungsi lingkungan	11	18,3	19	31,7	30	50
3	Manfaat berkaitan dengan mata pencaharian dan pendapatan	15	25	20	33,3	25	41,7
Rata-rata		11,67	19,43	19,0	31,67	29,33	48,90

Sumber : Data Primer 2013

Untuk Kelurahan Sapolohe bagi responden yang mempunyai tingkat partisipasi tinggi juga disebabkan karena beberapa program yang telah dilaksanakan memberikan manfaat yang besar, misalnya pembangunan tempat penampungan air, dan pendistribusian air ke rumah-rumah. Sebelumnya masyarakat memanfaatkan beberapa sumber mata air untuk keperluan mereka sehari-hari dari dengan dibangunnya penampungan air maka masyarakat dapat memperoleh air dengan mudah.

Sedangkan bagi responden yang mempunyai tingkat partisipasi rendah disebabkan karena tempat pembangunan penampungan air tersebut walaupun bermanfaat secara langsung namun mereka masih harus membayar kepada Pengelola sarana tersebut. Menurut masyarakat disekitar lokasi pembangunan sarana mereka tidak perlu membayar kepada

pihak pengelola sarana karena sumber air tersebut berasal dari mata air yang ada dalam lingkungan mereka. Selain itu juga manfaat dari program pengelolaan penyediaan sarana air bersih tersebut sudah disadari oleh beberapa responden telah memberikan manfaat efisiensi waktu dan sekaligus menjaga kelestarian sumber air guna menjamin ketersediaan air.

4. Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi

Sama halnya apa yang terjadi di Desa Mattoanging, kegiatan evaluasi program di Kel. Sapolohe juga sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang ditemui, faktor-faktor yang menjadi penghambat, dan bagaimana cara pemecahannya. Distribusi tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe di sajikan pada Tabel 25 berikut:

Tabel 25. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan penyediaan Sarana Air Bersih.

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi					
		Rendah		Sedang		Tinggi	
		F	%	F	%	F	%
1	Ikut terlibat dalam kegiatan Monev	23	38,3	16	26,7	21	35
2	Menghadiri pertemuan/rapat dalam kegiatan monev	32	53,3	19	31,7	9	15
3	Mengajukan usul/saran dalam rapat evaluasi	26	43,3	22	36,7	12	20
4	Laporan kemajuan kegiatan	24	40	23	38,3	13	21,7
Rata-rata		26,3	43,7	20	33,4	13,8	22,9

Sumber : Data Primer 2013

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe berada pada tingkat Partisipasi rendah (43,7%), sedang (33,4%) dan tinggi (22,9%). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi disebabkan oleh pemahaman masyarakat bahwa kegiatan evaluasi merupakan pekerjaan pihak pemerintah (petugas PSDA dan Cipta Karya) yang mempunyai kapasitas dalam program tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan komponen kegiatan yang kurang mendapat perhatian

dari masyarakat pelaksana program. Rekapitulasi Partisipasi responden sebagai variabel dependen yang meliputi komponen perencanaan, pelaksanaan, penerima manfaat, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh disajikan pada Tabel 26 berikut:

Tabel 26. Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kel. Sapolohe.

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi					
		Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%
1	Perencanaan	25,4	42,3	19,4	32,3	15,3	25,4
2	Pelaksanaan	15,4	25,6	20,1	33,5	24,5	40,8
3	Penerimaan Manfaat	11,67	19,43	19,0	31,67	29,33	48,90
4	Monitoring dan Evaluasi	26,3	43,7	20	33,4	13,8	22,9

Sumber : Data Primer 2013

Berdasarkan Tabel 26 diatas terlihat bahwa partisipasi dalam perencanaan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe tergolong rendah, partisipasi dalam pelaksanaan tergolong tinggi, partisipasi dalam penerima manfaat tergolong tinggi dan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi tergolong sedang.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

DESA MATTOANGIN

1. Faktor-Faktor Eksternal

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1599.565	133.496		-11.982	.000
Komunikasi (X1)	46.154	33.990	.130	1.358	.180
Sosekpolbud (X2)	169.774	38.091	.407	4.457	.000
Kesempatan (X3)	77.890	21.255	.214	3.665	.001
Kebebasan (X4)	198.661	26.144	.441	7.599	.000

a. Dependent Variable: Y

Hasil diatas menerangkan bahwa besarnya korelasi (R), koefisien determinasi (R^2), R^2 yang disesuaikan dan standar erorr, koefisien korelasi sebesar 0,936 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen (Komunikasi yang intensif (X1), Iklim Sosial,Ekonomi, Politik, dan Budaya (X2), Kesempatan untuk berpartisipasi (X3), Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi (X4)) dengan variabel dependent yaitu Y (tingkat partisipasi masyarakat) di Desa Mattoangin. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,876 memeberi pengertian bahwa besarnya Y (tingkat partisipasi masyarakat) di Desa Mattoangin yang dapat diterangkan oleh Komunikasi yang intensif (X1), Iklim Sosial,Ekonomi, Politik, dan Budaya

(X2), Kesempatan untuk berpartisipasi (X3), Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi (X4) adalah sebesar 87,6% yang tidak dapat dijelaskan hanya 2,4%.

Berdasarkan Tabel 27 di atas diperoleh persamaan $Y = -1599.565 + 46.154X_1 + 169.774X_2 + 77.890 X_3 + 198.661X_4$. Signifikan pada taraf kepercayaan 95% maupun 99%. Nilai ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, apakah variable independent (X) berpengaruh secara nyata atau tidak, dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t Tabel atau probabilitasnya (**Sig**) dengan taraf kesalahan (α). Dapat dilihat nilai probabilitasnya untuk X_1 sebesar $0,180 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel Komunikasi yang intensif tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Sedangkan nilai probabilitasnya untuk X_2 , X_3 , dan X_4 secara berturut-turut sebesar $0,000$, $0,001$, dan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa Iklim Sosial, Ekonomi, Politik, dan Budaya (X2), Kesempatan untuk berpartisipasi (X3), Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi (X4) berpengaruh sangat signifikan (nyata) terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Desa Mattoangin.

2. Faktor-Faktor Internal

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3212.589	442.564		-7.259	.000
Jenis Kelamin (X1)	279.914	160.394	.155	1.745	.087
Pekerjaan (X2)	201.840	33.132	.510	6.092	.000
Penghasilan (X3)	298.224	43.742	.456	6.818	.000
Umur (X4)	155.567	42.831	.305	3.632	.001
Lama Tinggal (X5)	19.220	49.743	.029	.386	.701
Pendidikan (X6)	515.972	165.940	.217	3.109	.003

a. Dependent Variable: Partisipasi

Hasil diatas menerangkan bahwa besarnya korelasi (R), koefisien determinasi (R^2), R^2 yang disesuaikan dan standar erorr, koefisien korelasi sebesar 0,895 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen (Jenis Kelamin (X1), Pekerjaan (X2), Penghasilan (X3), Umur (X4), Lama Tinggal (X5), dan Pendidikan (X6)) dengan variabel dependent yaitu Y (tingkat partisipasi masyarakat) di Desa Mattoangin. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,801 memeberi pengertian bahwa besarnya Y (tingkat partisipasi masyarakat) di Desa Mattoangin yang dapat diterangkan oleh Jenis Kelamin (X1), Pekerjaan (X2), Penghasilan (X3), Umur (X4), Lama Tinggal (X5), dan Pendidikan (X6) adalah sebesar 80,1% yang tidak dapat dijelaskan hanya 19,9%.

Berdasarkan Tabel 28 di atas diperoleh persamaan $Y = -3212.589 + 279.914X_1 + 201.840X_2 + 298.224X_3 + 155.567X_4 + 19.220X_5 + 515.972X_6$. Signifikan pada taraf kepercayaan 95% maupun 99%. Nilai ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, apakah variable independent (X) berpengaruh secara nyata atau tidak, dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t Tabel atau probabilitasnya (**Sig**) dengan taraf kesalahan (α). Dapat dilihat nilai probabilitasnya untuk X_1 dan X_5 sebesar $0,087 > 0,05$ dan $0,701 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel jenis kelamin dan lama tinggal tidak berpengaruh nyata terhadap partisipasi masyarakat. Sedangkan nilai probabilitasnya untuk X_2 , X_3 , X_4 dan X_6 secara berturut-turut sebesar $0,000$, $0,000$, $0,001$ dan $0,003 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa Pekerjaan (X_2), Penghasilan (X_3), Umur (X_4), dan Pendidikan (X_6) berpengaruh sangat signifikan (nyata) terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Desa Mattoangin.

Hubungan Faktor - faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Bersih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin masyarakat. Partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota suatu kelompok atau kesatuan kerja dengan cara memberikan dukungan (tenaga,

pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

Menurut Rahardjo (1999) pengelolaan berbasis masyarakat mengandung arti keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumberdaya air tanpa memperhatikan jenis kelamin masyarakat di suatu kawasan. Mengelola berarti masyarakat ikut memikirkan, memformulasikan, merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi maupun memonitor sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Besarnya prosentase dari masing-masing wujud partisipasi dapat bervariasi dari masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pekerjaan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan masyarakat. Jenis Pekerjaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat. Lebih jauh dikemukakan bahwa jenis pekerjaan dalam hal ini lebih ditekankan pada penyediaan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi masyarakat.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat

mempengaruhi keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dan lamanya tinggal, biasanya ini disebutkan sebagai faktor Internal atau dari dalam diri masyarakat.

Angell dalam Firmansyah, 2010 mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan masyarakat. Tingkat pendapatan adalah besar kecilnya penghasilan keluarga yang diperoleh dalam satu bulan. Tingkat pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan untuk berperan serta dalam berbagai aspek pembangunan termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Bila keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan keluarga mencukupi, maka besar

kemungkinan kebutuhan akan dapat terpenuhi dalam pengelolaan lingkungannya

Tingkat pendapatan dapat dijadikan salah satu parameter dalam menentukan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pendapatan yang tinggi cenderung menjamin tersedianya fasilitas yang dapat menunjang segala kebutuhan hidup seseorang tetapi dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur responden (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh komposisi umur masyarakat. Umur adalah salah satu identitas yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan pola pikir. Pada umumnya, seseorang yang telah berumur tua memiliki kemampuan fisik yang mulai menurun dan mengalami kesulitan dalam mengadopsi sesuatu yang baru tetapi cenderung mempunyai pengalaman yang lebih banyak. Sebaliknya, bagi mereka yang masih muda disamping kemampuan fisik yang masih kuat, mereka juga lebih muda menerima suatu inovasi baru. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal partisipasi masyarakat diperlukan dukungan pemahaman akan manfaat proyek, kesempatan dan kemampuan masyarakat

untuk berpartisipasi dalam kegiatan proyek secara bebas, langsung dan sukarela. Hal ini mendasari masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, dan monitoring/evaluasi.

Hasil penelitian Bahagia (2009) menunjukkan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan *monitoring*, *control* dan *evaluation* dapat terlaksana dengan baik oleh adanya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang baik dilakukan oleh lembaga penyelenggara program rehabilitasi yang pada akhirnya keberlangsungan hasil rehabilitasi dapat terjaga sampai pada tahap mandiri atau sudah mampu dilepaskan pertumbuhannya. Sesuai dengan pendapat Sudarmadji (2001) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan *monitoring*, *control* dan *evaluation* merupakan wujud pendampingan nyata yang telah dilakukan sehingga terbentuk rasa kepemilikan yang tinggi dari masyarakat tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama tinggal (X5) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak dipengaruhi oleh lamanya tinggal masyarakat. Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa

memiliki terhadap lingkungan cenderung terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan (X6) sangat berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan dalam hubungannya dengan pola pikir, sikap dan perilaku manusia dalam aktifitas sehari-hari, maka tingkat pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu indikator yang sangat menentukan, tingkat pendidikan masyarakat atau seseorang sangat mempengaruhi tingkat penerimaannya terhadap motivasi dan inovasi dalam rangka melakukan pelaksanaan program.

Ditinjau dari reformasi pengembangan sumber daya manusia, maka pendidikan memegang peranan yang sangat menentukan. Manusia dengan profesinya dituntut memiliki keahlian khusus atau kompetensi dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang telah ditempuhnya. Pendidikan formal yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan yang bersifat formal sesuai yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) bahwa pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat.

Kekuatan tingkah laku seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu keadaan dapat digambarkan oleh lemah tidaknya dorongan yang mendasarinya. Suatu dorongan akan timbul bila ada suatu kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Setidaknya ada dua faktor penghambat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Indonesia, Hadi (1982) dalam Muslimin Arifin (2009) mengatakan bahwa faktor sosial dan budaya. Secara sosiologis, rendahnya tingkat pendidikan serta terbatasnya akses untuk informasi akan mempengaruhi tingkat atau kadar partisipasi.

Berdasarkan berbagai defenisi tentang pendidikan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditegaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses atau perlakuan yang diberikan yang dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang sehingga dapat melakukan perubahan pada dirinya, keluarga, masyarakat, dan lingkungan hidupnya. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi keberadaannya atau aksesnya terhadap berbagai kemungkinan hidup sehat, sejahtera, damai, dan bahagia.

KELURAHAN SAPOLOHE

1. Faktor-Faktor Eksternal

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4031.694	112.399		-35.869	.000
Komunikasi (X1)	269.057	13.764	.383	19.547	.000
Sosekpolbud (X2)	201.509	16.172	.239	12.460	.000
Kesempatan (X3)	209.594	15.855	.306	13.219	.000
Kebebasan (X4)	217.299	11.168	.448	19.457	.000

a. Dependent Variable: Y

Hasil diatas menerangkan bahwa besarnya korelasi (R), koefisien determinasi (R^2), R^2 yang disesuaikan dan standar erorr, koefisien korelasi sebesar 0,992 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen (Komunikasi yang intensif (X1), Iklim Sosial,Ekonomi, Politik, dan Budaya (X2), Kesempatan untuk berpartisipasi (X3), Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi (X4) dengan variabel dependent yaitu Y (tingkat partisipasi masyarakat) di Kelurahan Sapolohe. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,984 memberi pengertian bahwa besarnya Y (tingkat partisipasi masyarakat) di Kelurahan Sapolohe yang dapat diterangkan oleh Komunikasi yang intensif (X1), Iklim Sosial,Ekonomi, Politik, dan Budaya (X2), Kesempatan untuk berpartisipasi (X3), Kebebasan untuk

berprakarsa dan berkreasi (X4) adalah sebesar 98,4% yang tidak dapat dijelaskan hanya 1,6%.

Berdasarkan hasil dari table 29 diperoleh persamaan $Y = -4031.694 + 269.057X_1 + 201.509X_2 + 209.594X_3 + 217.299X_4$. Signifikan pada taraf kepercayaan 95% maupun 99%. Nilai ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, apakah variabel independent (X) berpengaruh secara nyata atau tidak, dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t Tabel atau probabilitasnya (**Sig**) dengan taraf kesalahan (α). Dapat dilihat nilai probabilitasnya untuk X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 secara berturut-turut sebesar 0,000, 0,000, 0,000, dan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa Komunikasi yang intensif (X_1), Iklim Sosial, Ekonomi, Politik, dan Budaya (X_2), Kesempatan untuk berpartisipasi (X_3), Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi (X_4) berpengaruh sangat signifikan (nyata) terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Sapolohe.

2. Faktor-Faktor Internal

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3195.601	658.582		-4.852	.000
Jenis Kelamin (X1)	423.080	163.742	.222	2.584	.013
Pekerjaan (X2)	296.122	49.150	.626	6.025	.000
Penghasilan (X3)	365.474	79.099	.371	4.620	.000
Umur (X4)	243.929	66.712	.428	3.656	.001
Lama Tinggal (X5)	.061	83.627	.000	.001	.999
Pendidikan (X6)	-11.356	229.385	-.005	-.050	.961

a. Dependent Variable: Partisipasi

Hasil diatas menerangkan bahwa besarnya korelasi (R), koefisien determinasi (R^2), R^2 yang disesuaikan dan standar erorr, koefisien korelasi sebesar 0,868 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen (Jenis Kelamin (X1), Pekerjaan (X2), Penghasilan (X3), Umur (X4), Lama Tinggal (X5), dan Pendidikan (X6)) dengan variabel dependent yaitu Y (tingkat partisipasi masyarakat) di Kelurahan Sapolohe. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,753 memeberi pengertian bahwa besarnya Y (tingkat partisipasi masyarakat) di Kelurahan Sapolohe yang dapat diterangkan oleh Jenis Kelamin (X1), Pekerjaan (X2), Penghasilan (X3), Umur (X4), Lama Tinggal (X5), dan Pendidikan (X6) adalah sebesar 75,3% yang tidak dapat dijelaskan hanya 24,7%.

Berdasarkan Tabel 30 di atas diperoleh persamaan $Y = -3195.601 + 423.080X_1 + 296.122X_2 + 365.474X_3 + 243.929X_4 + 0.061X_5 + (-11.356)X_6$. Signifikan pada taraf kepercayaan 95% maupun 99%. Nilai ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, apakah variable independent (X) berpengaruh secara nyata atau tidak, dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t Tabel atau probabilitasnya (**Sig**) dengan taraf kesalahan (α). Dapat dilihat nilai probabilitasnya untuk X_5 dan X_6 sebesar $0,999 > 0,05$ dan $0,961 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel jenis lama tinggal dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh nyata terhadap partisipasi masyarakat. Sedangkan nilai probabilitasnya untuk X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 secara berturut-turut sebesar $0,013$, $0,000$, $0,001$ dan $0,003 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa Jenis Kelamin (X_1), Pekerjaan (X_2), Penghasilan (X_3), dan Umur (X_4), berpengaruh sangat signifikan (nyata) terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Sapolohe.

Hubungan Faktor - faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Bersih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh jenis kelamin masyarakat. Partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota suatu kelompok atau kesatuan kerja dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran

maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

Menurut Rahardjo (1999) pengelolaan berbasis masyarakat mengandung arti keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumberdaya air tanpa memperhatikan jenis kelamin masyarakat di suatu kawasan. Mengelola berarti masyarakat ikut memikirkan, memformulasikan, merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi maupun memonitor sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Besarnya prosentase dari masing-masing wujud partisipasi dapat bervariasi dari masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pekerjaan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan masyarakat. Jenis Pekerjaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat. Lebih jauh dikemukakan bahwa jenis pekerjaan dalam hal ini lebih ditekankan pada penyediaan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi masyarakat.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat

mempengaruhi keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dan lamanya tinggal, biasanya ini disebutkan sebagai faktor Internal atau dari dalam diri masyarakat.

Angell dalam Firmansyah, 2010 mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan masyarakat. Tingkat pendapatan adalah besar kecilnya penghasilan keluarga yang diperoleh dalam satu bulan. Tingkat pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan untuk berperan serta dalam berbagai aspek pembangunan termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Bila keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan keluarga mencukupi, maka besar

kemungkinan kebutuhan akan dapat terpenuhi dalam pengelolaan lingkungannya

Tingkat pendapatan dapat dijadikan salah satu parameter dalam menentukan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pendapatan yang tinggi cenderung menjamin tersedianya fasilitas yang dapat menunjang segala kebutuhan hidup seseorang tetapi dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur responden (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh komposisi umur masyarakat. Umur adalah salah satu identitas yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan pola pikir. Pada umumnya, seseorang yang telah berumur tua memiliki kemampuan fisik yang mulai menurun dan mengalami kesulitan dalam mengadopsi sesuatu yang baru tetapi cenderung mempunyai pengalaman yang lebih banyak. Sebaliknya, bagi mereka yang masih muda disamping kemampuan fisik yang masih kuat, mereka juga lebih muda menerima suatu inovasi baru. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal partisipasi masyarakat diperlukan dukungan pemahaman akan manfaat proyek, kesempatan dan kemampuan masyarakat

untuk berpartisipasi dalam kegiatan proyek secara bebas, langsung dan sukarela. Hal ini mendasari masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, dan monitoring/evaluasi.

Hasil penelitian Bahagia (2009) menunjukkan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan *monitoring*, *control* dan *evaluation* dapat terlaksana dengan baik oleh adanya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang baik dilakukan oleh lembaga penyelenggara program rehabilitasi yang pada akhirnya keberlangsungan hasil rehabilitasi dapat terjaga sampai pada tahap mandiri atau sudah mampu dilepaskan pertumbuhannya. Sesuai dengan pendapat Sudarmadji (2001) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan *monitoring*, *control* dan *evaluation* merupakan wujud pendampingan nyata yang telah dilakukan sehingga terbentuk rasa kepemilikan yang tinggi dari masyarakat tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama tinggal (X5) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak dipengaruhi oleh lamanya tinggal masyarakat. Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa

memiliki terhadap lingkungan cenderung terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan (X6) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Artinya tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan dalam hubungannya dengan pola pikir, sikap dan perilaku manusia dalam aktifitas sehari-hari, maka tingkat pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu indikator yang sangat menentukan, tingkat pendidikan masyarakat atau seseorang sangat mempengaruhi tingkat penerimaannya terhadap motivasi dan inovasi dalam rangka melakukan pelaksanaan program.

Ditinjau dari reformasi pengembangan sumber daya manusia, maka pendidikan memegang peranan yang sangat menentukan. Manusia dengan profesinya dituntut memiliki keahlian khusus atau kompetensi dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang telah ditempuhnya. Pendidikan formal yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan yang bersifat formal sesuai yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) bahwa pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat.

Kekuatan tingkah laku seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu keadaan dapat digambarkan oleh lemah tidaknya dorongan yang mendasarinya. Suatu dorongan akan timbul bila ada suatu kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Setidaknya ada dua faktor penghambat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Indonesia, Hadi (1982) dalam Muslimin Arifin (2009) mengatakan bahwa faktor sosial dan budaya. Secara sosiologis, rendahnya tingkat pendidikan serta terbatasnya akses untuk informasi akan mempengaruhi tingkat atau kadar partisipasi.

Berdasarkan berbagai defenisi tentang pendidikan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditegaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses atau perlakuan yang diberikan yang dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang sehingga dapat melakukan perubahan pada dirinya, keluarga, masyarakat, dan lingkungan hidupnya. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi keberadaannya atau aksesnya terhadap berbagai kemungkinan hidup sehat, sejahtera, damai, dan bahagia.

5. Keberlanjutan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Penyediaan Sarana Air Bersih

Desa Mattoanging

Berdasarkan hasil *Focus Group Discation* (FGD) diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan sarana penyediaan air bersih, masyarakat menentukan opsi pilihan sendiri artinya masyarakat

menentukan sendiri sumber air yang akan digunakan untuk sarana penyediaan air bersih yang diharapkan bisa berkesinambungan dan efektif. Sarana Air Bersih yang dibangun merupakan sarana yang layak digunakan, selanjutnya dibangun, dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga dengan demikian mulai dari proses perencanaan sampai pada pengelolaan dan pemanfaatan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Mattoangin.

Sarana Penyediaan air minum ini merupakan salah satu komponen proyek PAMSIMAS, dimana masyarakat secara musyawarah menentukan pilihannya tentang jenis SAM apa yang diinginkan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih dan sanitasi. Dengan sendirinya pilihan tersebut membawa konsekuensi untuk dilaksanakan menyangkut penyediaan dana kontribusi dalam bentuk uang dan material termasuk tenaga serta kesanggupan untuk mengoperasikan, memelihara serta mengembangkannya sehingga SAM menjadi kesinambungan.

Dalam perencanaan SAM, masyarakat Desa Mattoanging menggunakan teknik dan sarana berupa penggalian sumur bor, pembangunan reservoir atau bak penampungan air. Pemilihan metode penggalian sumur bor dilakukan berdasarkan pada asumsi bahwa di Desa Mattoanging memiliki sumber-sumber air bersih yang kurang bahkan cukup jauh dari pemukiman penduduk, sehingga masyarakat sepakat untuk

membuat sumur bor yang terletak di tengah-tengah pemukiman warga. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pendistribusian air minum kerumah-rumah warga.

Perencanaan kerja masyarakat pembangunan fisik program pamsimas sumber air minum untuk Desa Mattoanging yaitu berupa sumur bor yang di tempatkan di dusun Maccini. Untuk penempatan pembangunan bak reservoir di tempatkan di dusun Patikoro. Dalam pengelolaan sarana penyediaan air minum sumur diadakan pemberian berupa batu kerikil, pasir dan batu kerikil pada dasar sumur, sementara pada pipa yang gunanya untuk penyerapan masuknya air dalam pipa di adakan penyaringan berupa ijuk, dan pasir. Cara ini untuk mendapatkan air minum yang layak dikonsumsi dan sumber air sumur bor ini telah di uji dilaboratorium dinas kesehatan mengenai kelayakan konsumsi air minum oleh terbebasnya dari jenis bakteri E. coli.

Proses pembuatan sarana air minum ini di mulai dari tahap penggalian sumber air minum (SAM) berupa sumur bor, selanjutnya pembuatan reservoir yang berfungsi sebagai bak penampung air bersih sebelum di distribusikan ke rumah-rumah warga melalui pipa-pipa paralon yang berstandar SNI. Disamping sebagai bak penampung air, reservoir ini juga berfungsi sebagai penjernih air, dimana dalam bak ini terjadi proses sedimentasi secara alami, sehingga material-material seperti lumpur, serasah dan kotoran lainnya mengalami proses sedimentasi/pengendapan pada dasar reservoir. Untuk

menjaga kualitas air dan reservoir agar tetap bersih maka warga secara berkala melakukan pengurasan dan pembersihan reservoir.

Pengelolaan sarana penyediaan ini dikelola oleh BP-SPAMS atau Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Badan pengelola ini bertugas untuk menjaga mengelola dan menjalankan operasional dan perawatan dari sarana air bersih dan (atau) sanitasi yang telah dibangun termasuk didalamnya perubahan lingkungan dan perilaku agar dapat terus berkembang dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jika ada kendala atau masalah dalam pengelolaan masyarakat dapat mengadukannya kepada unit pengaduan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat diangkat atas keputusan masyarakat. Unit pengaduan ini mengelola masalah yang masuk dan membahas bersama-sama masyarakat dan pemerintah setempat untuk mencapai asas mufakat.

Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Penyediaan sarana air minum yang dilakukan oleh masyarakat desa Mattoanging yakni penggalian sumur bor, pembangunan bak reservoir, penggalian pipa dari sumber air ke Transmisi, penggalian pipa di depan rumah masyarakat untuk pendistribusi dan pembangunan hidran umum. Jika ada kerusakan pipa masyarakat atau air tidak tersedia di rumah masyarakat, masyarakat bisa langsung melaporkannya kepada pengelola bagian teknis. Dalam sebulan air di alirkan tiap-tiap 2 hari ke rumah-rumah, dan pengelola mengumumkan

atau secara langsung memberikan informasi langsung ke masyarakat pemakai air bahwa air mengalir hari ini, ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pemerataan penggunaan air.

Sumber air sumur bor ini belum cukup digunakan untuk keseluruhan masyarakat desa Mattoanging, jadi pemberian air diprioritas kepada dusun yang tidak memiliki sumber air. Bak Reservoir di cuci satu kali seminggu. Pipa-pipa transmisi dan distribusi di periksa tiap satu kali seminggu oleh pengelola dan masyarakat untuk tetap mendapatkan layanan air yang berkesinambungan. Pembangunan hidran umum sebanyak enam buah dengan memperhatikan SPAL atau saluran pembuangan air limbah agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Kesinambungan

Dalam kerangka pembangunan sarana air minum terdapat 5 faktor yang mempengaruhi tingkat kesinambungan program, yaitu:

a. Kesinambungan Teknis

Mencakup kepada berfungsinya secara benar dan dapat diandalkan terhadap teknologi serta pelayanan sistim air minum ini dapat memberikan pelayanan dengan jumlah air yang memadai secara kontinu dengan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan. Equity/Kesetaraan mencakup pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok masyarakat dengan prioritas orang miskin yang

mebutuhankan air bersih secara gratis yang ada di Desa Mattoangin. Pemenuhan untuk tercapainya faktor kesinambungan teknis yakni; 1) Perencanaan yang baik sesuai dengan standar-standar teknis; 2) Pemilihan tenaga-tenaga pelaksana yang mampu dan terampil untuk pelaksanaan; 3) Pelaksanaan yang baik sesuai kuantitas dan kualitas yang direncanakan; 4) Operasi dan pemeliharaan.

b. Kesinambungan Financial

Sistem hanya dapat berfungsi bila sumber pendanaan/financial paling tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional, pemeliharaan dan perbaikan. Equity/kesetaraan berhubungan dengan siapa yang akan menjadi sumber pendanaan, bagaimana secara adil asal sumber pendanaan ini akan ditanggung secara bersama diantara para pemanfaat yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang berbeda yang ada di Desa Mattoangin.

c. Kesinambungan Kelembagaan

Apakah dalam proses pembentukan badan pengelola telah memperhatikan kesetaraan gender dan pelibatan kelompok miskin, serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan transparansi. Kelembagaan yang ada harus mempunyai karakteristik lokal (menyesuaikan dengan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat), aturan dan akuntabilitas. Equity/kesetaraan mempertimbangkan suara semua golongan, terutama

masyarakat miskin dan wanita didalam organisasi yang akan mengelola dan mengontrol sistem. Selain itu dalam kaitannya dengan pengembangan kemampuan melalui pelatihan juga harus melibatkan kelompok miskin dan kesetaraan gender, baik dalam menentukan jenis pelatihan maupun peserta pelatihan.

d. Kestinambungan Sosial

Pemanfaat akan mendukung kestinambungan sistem bila harapan mereka dapat terpenuhi, ini berarti bahwa pelayanan yang ada harus mudah mereka akses, yang mana pemanfaat diberikan pilihan untuk teknologi pelayanan sesuai dengan kemampuan pembiayaan, budaya dan tata cara keseharian. Aspek equity/kesetaraan melihat bagaimana keuntungan dari pemanfaatan sistem dapat dibagi secara adil sesuai dengan perbedaan kondisi sosio-ekonomi, gender dan kemiskinan.

e. Kestinambungan Lingkungan

Sumber air akan menghadapi banyak ancaman, seperti terlalu besarnya penyadapan, kontaminasi, penggundulan hutan, dan fasilitas/sarana air bersih dan sanitasi sendiri juga akan menjadikan ancaman terhadap lingkungan seperti tidak tersedianya drainase yang memadai sehingga menimbulkan genangan yang memungkinkan tempat berkembang biaknya serangga pembawa penyakit seperti malaria dsb. Hal-hal tersebut diatas yang harus diperhatikan untuk dilaksanakan atau

dihindari. Aspek equity/kesetaraan mencakup pembagian tanggung jawab secara adil diantara pemanfaat untuk melindungi sumber air dan lingkungan.

Pengamatan Lingkungan

Kegiatan pembangunan sarana penyediaan air minum dipastikan tidak akan menimbulkan dampak berarti yang tidak diinginkan terhadap lingkungan hidup dan sosial, sesuai dengan pendekatan berbasis masyarakat terhadap pengadaan air minum. Namun demikian masih terdapat potensi untuk melokalisir dampak yang ditimbulkan oleh Program Pamsimas. Manfaat utama terhadap lingkungan diharapkan akan tumbuh sejalan dengan meningkatnya sanitasi lingkungan disebabkan program ini. Jenis dampak positif dan negatif bagi lingkungan hidup yang mungkin terjadi adalah:

a. Dampak positif :

1. Peningkatan penyediaan air bersih secara kualitas dan kuantitas kepada masyarakat, dengan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.
2. Peningkatan jangkauan jamban keluarga yang sehat sehingga mengurangi perilaku buang air di sembarang tempat, meningkatkan kualitas air tanah dan air, pemutusan siklus penyakit yang disebabkan oleh air dan lingkungan.

3. Pengurangan air limbah dengan perbaikan instalasi saluran air limbah (drainase).
 4. Pelatihan masyarakat tentang monitoring kualitas secara sederhana
 5. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan lingkungan
- b. Dampak negative
1. Peningkatan penggunaan air akan mengakibatkan peningkatan limbah yang dihasilkan.
 2. Perluasan jangkauan air bersih akan meningkatkan biaya pengawasan terutama terhadap limbah yang dihasilkan.
 3. Kesalahan rancang bangun, penempatan lokasi sarana dan kualitas konstruksi yang rendah akan mengakibatkan pencemaran limbah terhadap sarana air bersih.

Pengelolaan Lingkungan

Aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan sarana air minum yang ada di Desa Mattoangin adalah :

1. Rincian sarana yang akan dibangun, lokasi dan jenis sumber air, keadaan lingkungan disekitar sumber air sebelum dibangun, jalur pipa, perilaku masyarakat pengguna sumber dan area yang perlu dilindungi.
2. Keadaan alam dan budaya yang akan dipengaruhi oleh pembangunan sarana

3. Perkiraan dampak yang dihasilkan
4. Pengelolaan dampak yang ditimbulkan atau yang akan ditimbulkan.

Kelurahan Sapolohe

Berdasarkan hasil *Focus Group Discation* (FGD) diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan sarana penyediaan air bersih, mulai dari proses perencanaan sampai pada pengelolaan dan pemanfaatan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Sapolohe

Perencanaan SAM di Kelurahan Sapolohe sumber air bersih dari Danau. Pemilihan danau sebagai sumber air bersih di Kelurahan Sapolohe ini di sebabkan karena berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan analisis daya dukung dan kelayakan yang dilakukan bahwa air danau ini cukup tersedia, baik secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas air. Disamping itu, keberadaan danau ini juga cukup strategis yaitu berada di dekat perumahan warga yang ada di Kelurahan Sapolohe. Sehingga dimungkinkan untuk dikelola sebagai sumber air minum bagi warga.

Kelurahan Sapolohe sumber air minumnya di ambil dari danau yang bernama ere menerang, pengelolaan sumber air ini dilakukan beberapa proses pengelolaan berupa pemberian filter atau penyaringan dipengisapan air pada ujung pipa di tambahkan ijuk, penyaringan pada klep pelepas air ke rumah-rumah dibeli khusus untuk penyaringan atau filter. Pada

penampungan reservoir si beri ijuk sebagai penyaring dan bak reservoir ini di bersihkan satu kali dalam seminggu untuk mendapatkan air minum yang layak konsumsi sesuai standar kesehatan. Pengecekan pipa transmisi dan distribusi dilakukan satu kali seminggu. Pelaksanaan pada program ini berupa pembangunan bak penampungan atau reservoir, penggalian pipa transmisi air dari sumber ke bak reservoir dan pipa distribusi air dari bak penampungan atau reservoir ke rumah-rumah masyarakat pemakai air. Pengaliran air ke rumah-rumah masyarakat pemakai air dilakukan setiap hari. Sumber air ini telah di cek kelayakannya pada dinas kesehatan dan telah disertiifikasi kelayakan.

Proses pembuatan sarana air minum ini di mulai dari tahap pemasangan pompa air dan jaringan pipa paralon yang berstandar SNI yang digunakan untuk mengangkat dan mengalirkan air danau kedalam reservoir (yang telah di buat sebelumnya) yang berfungsi sebagai bak penampung air. Di dalam reservoir inilah air danau di proses secara alami melalui proses sedimentasi untuk proses penjernihan air dengan menggunakan pasir kasar dan halus serta serabut. Sehingga material-material seperti lumpur, serasah dan kotoran lainnya mengalami proses pengendapan pada dasar reservoir sehingga air danau menjadi jernih dan bersih. Selanjutnya air yang telah jernih selanjutnya di alirkan kedalam reservoir yang berfungsi untuk

menampung air bersih yang akan di distribusikan kerumah-rumah warga dengan menggunakan paralon-paraon dan selang air.

Kesinambungan

Dalam kerangka pembangunan sarana air minum terdapat 5 faktor yang mempengaruhi tingkat kesinambungan program, yaitu:

a. Kesinambungan Teknis

Mencakup kepada berfungsinya secara benar dan dapat diandalkan terhadap teknologi serta pelayanan sistim air minum ini dapat memberikan pelayanan dengan jumlah air yang memadai secara kontinyu dengan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan. Sehingga secara teknis juga dilakukan tindakan-tindakan pelestarian fungsi danau, menjaga kealamian danau dan melestarikan hutan.

b. Kesinambungan Financial

Sistem hanya dapat berfungsi bila sumber pendanaan/financial paling tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana serta memperhitungkan biaya untuk pelestarian danau.

c. Kesinambungan Kelembagaan

Kelembagaan yang dibangun harus mempunyai karakteristik lokal (menyesuaikan dengan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat), aturan dan akuntabilitas. tetap mempertimbangkan suara semua

golongan, terutama masyarakat miskin dan wanita didalam organisasi yang akan mengelola dan mengontrol sistem sarana air bersih serta peduli terhadap kelestarian fungsi danau sebagai sumber air bersih. Selain itu dalam kaitannya dengan pengembangan kemampuan melalui pelatihan juga harus melibatkan kelompok miskin dan kesetaraan gender, baik dalam menentukan jenis pelatihan maupun peserta pelatihan.

d. Kestinambungan Sosial

Pemanfaat akan mendukung kesinambungan sistem bila harapan mereka dapat terpenuhi, ini berarti bahwa pelayanan yang ada harus mudah mereka akses, yang mana pemanfaat diberikan pilihan untuk teknologi pelayanan sesuai dengan kemampuan pembiayaan, budaya dan tata cara keseharian. Sesuai dengan perbedaan kondisi sosio-ekonomi, gender dan kemiskinan. Serta secara sosial masyarakat juga diberikan pemahaman untuk bersama-sama ikut berpartisipasi dalam melestarikan sumber air bersih yaitu danau, agar air danau tidak tercemar oleh aktivitas warga.

e. Kestinambungan Lingkungan

Sumber air akan menghadapi banyak ancaman, seperti pencemaran, kekeringan, pengangkalan akibat erosi dan sedimentasi yang tinggi dan fasilitas/sarana air bersih yang rusak. Oleh karena itu diperlukan

partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian sumber-sumber air bersih tersebut seperti danau. Hal ini dapat dilakukan dengan pembagian tanggung jawab secara adil diantara pemanfaat untuk melindungi sumber air dan lingkungan serta ikut melakukan program-program penghijauan, pengembangan sistem pertanian konservatif dan penjagaan atau perlindungan terhadap sarana air secara berkala.

Pengamatan Lingkungan

Manfaat utama terhadap lingkungan diharapkan akan tumbuh sejalan dengan meningkatnya sanitasi lingkungan disebabkan program ini. Jenis dampak positif dan negatif bagi lingkungan hidup yang mungkin terjadi adalah:

- a. Dampak positif :
 1. Peningkatan penyediaan air bersih secara kualitas dan kuantitas kepada masyarakat, dengan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.
 2. Pelestarian fungsi danau secara berkelanjutan.
 3. Mencegah banjir dan kekeringan
 4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian hutan sebagai komponen pendukung ketersediaan air bersih pada danau.
 5. Mengurangi pencemaran air
 6. Pelatihan masyarakat tentang monitoring kualitas secara sederhana

7. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan lingkungan
 - b. Dampak negatif
 1. Pemanfaatan danau sebagai sumber air bersih secara sosial dapat merubah struktu masyarakat secara umum, kebiasaan dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan cara pandang masyarakat terhadap lingkungan, khususnya danau.
 2. Kesalahan rancang bangun, penempatan lokasi sarana dan kualitas konstruksi yang rendah akan mengakibatkan pencemaran limbah terhadap sarana air bersih.

Pengelolaan Danau Dan Lingkungan

Kestabilan sumber air baku yaitu danau perlu terus dijaga dan dilestarikan, sehingga terhindar dari pencemaran limbah industri maupun limbah rumah tangga. Ada 3 (tiga) langkah untuk melestarikan sumber air baku yakni dengan meningkatkan kewaspadaan pencemaran dengan perangkat hukum, melaksanakan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan menurut ketentuan AMDAL dan pelestarian alam dan lingkungannya utamanya disekitar daerah tangkapan air dengan penghijauan untuk menunjang keseimbangan air di dalam tanah dengan tanaman kluwih, sukun, nangka, beringin dll.

Pengelolaan kualitas air yang telah dilakukan dan dikelola oleh masyarakat kelurahan Sapolohe yakni pemberian saringan manual berupa

ijuk dan pasir. Pengelolaan sarana penyediaan air minum untuk kebutuhan air masyarakat di lakukan pembersihan bak reservoir 2 (dua) kali sebulan oleh petugas pengelola dan demi terciptanya pengelolaan sarana penyediaan air minum yang berkelanjutan di bentuk badan pengelola yakni BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). BP.SPAMS adalah merupakan wadah/lembaga di desa dengan tujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat mampu mengelola dan memanfaatkan sarana air minum secara efektif dan efisien serta, menciptakan perilaku hidup bersih. Guna menjamin kesinambungan, keberlanjutan dan pemanfaatan yang panjang dari hasil program Pamsimas oleh masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara deskriptif, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih di Desa Mattoanging secara berkelanjutan total skor adalah 1.349 yang termasuk dalam tingkat partisipasi *Placation* yang berkisar antara nilai interval 1351 – 1612. Sedangkan untuk Kelurahan Sapolohe total skor adalah 1.887 yang termasuk dalam tingkat partisipasi *Delegated Power* nilai interval 1876 – 2137. jadi tingkat partisipasi terhadap pengelolaan sarana air bersih di Kelurahan Sapolohe jauh lebih baik dari pada tingkat partisipasi di Desa Mattoanging.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih di desa Mattoanging pada perencanaan tergolong rendah, pada pelaksanaan cukup tinggi, sedangkan pada penerima manfaat tergolong tinggi, dan pada monitoring dan evaluasi tergolong rendah. Sedangkan Partisipasi dalam pengelolaan sarana air minum pada kelurahan Sapolohe untuk perencanaan tergolong cukup tinggi, dalam pelaksanaan tinggi,

sedang dalam penerima manfaat tergolong tinggi dan pengelolaan dalam monitoring dan evaluasi juga tinggi.

3. Untuk Desa Mattoanging faktor-faktor eksternal Komunikasi yang intensif (X1) tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Sedangkan Iklim Sosial, Ekonomi, Politik, dan Budaya (X2), Kesempatan untuk berpartisipasi (X3), Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi (X4) berpengaruh sangat signifikan (nyata) terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
4. Untuk Desa Mattoanging faktor-faktor internal jenis kelamin dan lama tinggal tidak berpengaruh nyata terhadap partisipasi masyarakat. Sedangkan Pekerjaan (X2), Penghasilan (X3), Umur (X4), dan Pendidikan (X6) berpengaruh sangat signifikan (nyata) terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Desa Mattoangin.
5. Untuk Kelurahan Sapolohe faktor-faktor eksternal Komunikasi yang intensif (X1), Iklim Sosial, Ekonomi, Politik, dan Budaya (X2), Kesempatan untuk berpartisipasi (X3), Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi (X4) berpengaruh sangat signifikan (nyata) terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
6. Untuk Kelurahan Sapolohe faktor-faktor internal jenis lama tinggal dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh nyata terhadap partisipasi masyarakat. Sedangkan Jenis Kelamin (X1), Pekerjaan (X2),

Penghasilan (X3), dan Umur (X4), berpengaruh sangat signifikan (nyata) terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

7. Pembangunan pengelolaan penyediaan sarana air bersih di Desa Mattoanging dan Kelurahan Sapolohe memberikan dampak yang positif bagi masyarakat baik dari aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

B. SARAN

Kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih partisipatif yang menunjang partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan dan pelestarian sumber daya air secara berkelanjutan sehingga menjadi sarana motivasi masyarakat untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dengan bijaksana dan pada akhirnya masyarakat lebih protektif terhadap upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. 2001. *Ilmu pendidikan*. Jakarta. Asdi Mahasatya.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V, Cetakan Dua belas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnstein, Sherry R. 1995. *A Ladder of Citizen Participation dalam Jay M. Stein (ed). Classic Reading in Urrban Planning : An Introduction*. McGraw-Hill, Inc, New York.
- Asian Development Bank/Government of Indonesia (ADB). 1992. *Sustainable Mangrove and Coastal Zone Management Project Sulawesi (Draft Interim report)*. Ujung Pandang: Chemonics International consulting Division dan Pusat Studi Lingkungan Unhas.
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. 1997. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Makassar: Bappedalda.
- Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi, 2004; Departemen Kempraswil, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Bahagia, 2009. *Peran pemerintah daerah dan partisipasi Masyarakat dalam rehabilitasi hutan Mangrove pasca tsunami di kecamatan Baitussalam tahun 2008*. Tesis Sekolah pascasarjana Universitas sumatera utara. Medan.
- Budiharjo, Eko dan Joko Sujarto, 1998. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Penerbit Undip. Semarang.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Conyers, Diana (1992). *Suatu Pengantar Perencanaan Sosial Dunia Ketiga*. Diterjemahkan oleh Susetiawan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dahuri, R. 2000. *Reformasi pengaturan Lingkungan Bidang Sumber Daya Pesisir dan LAutan*. Bogor: PKSPL-IPB.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung.

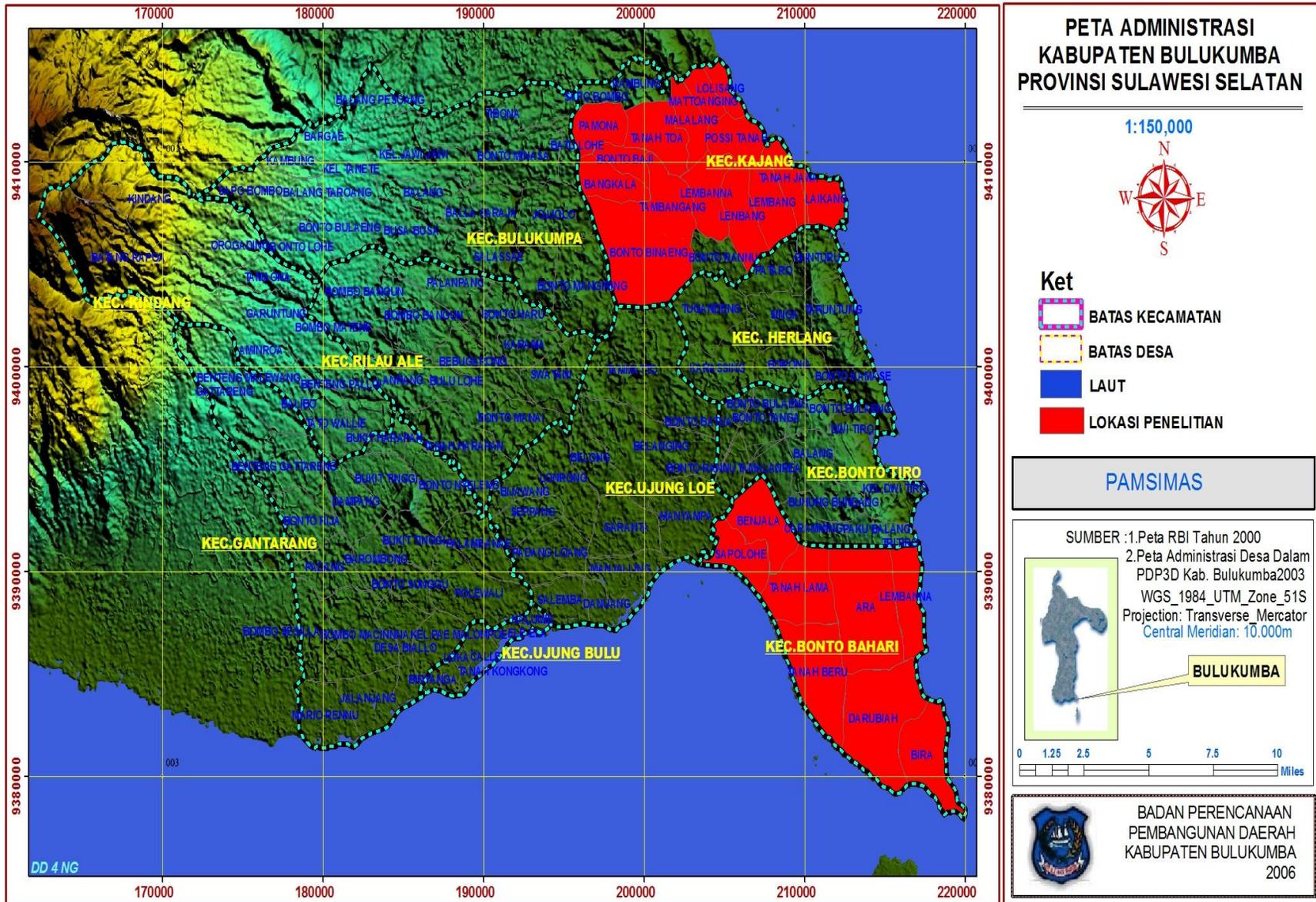
- Darmono. 2001. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Davey, KJ. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Penerbit UI-Press. Jakarta Godscalk dalam Fageance. 1997. *Citizen Participation in the Planning*. Oxford England, Pergamon Press.
- Dwi Priyatno. 2012. *SPSS untuk Analisis Data dan Uji Statistik*.
- Gleick, W. 2000. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Grasindo. Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research*. Andi. Yogyakarta.
- Hammer, Mark and Hammer, Jr. 2004. *Water and Wastewater Technology Prentice Hall of India Private Limited*. New Delhi.
- Hindarko, S. 2003. *Mengolah Air Limbah Supaya Tidak Mencemaraikan Orang Lain*. Penerbit ESHA. Jakarta.
- Holil Soelaiman. (1980). *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kipp, Sarah and Callaway, Clive. 2002. *Conservation Marketing Tools and Technique of Living By Water Project*. Salmon Arm. Canada.
- Kodoatie, Robert dan Sjarief, Roestam. 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Krina P. Loina Lalolo (2003). „*Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*“, Sekreariat Good Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Micalf dan Eddy. 1981. *Water and Wastewater Engineering : Collection, Treatment & Disposal*. TMH. India.

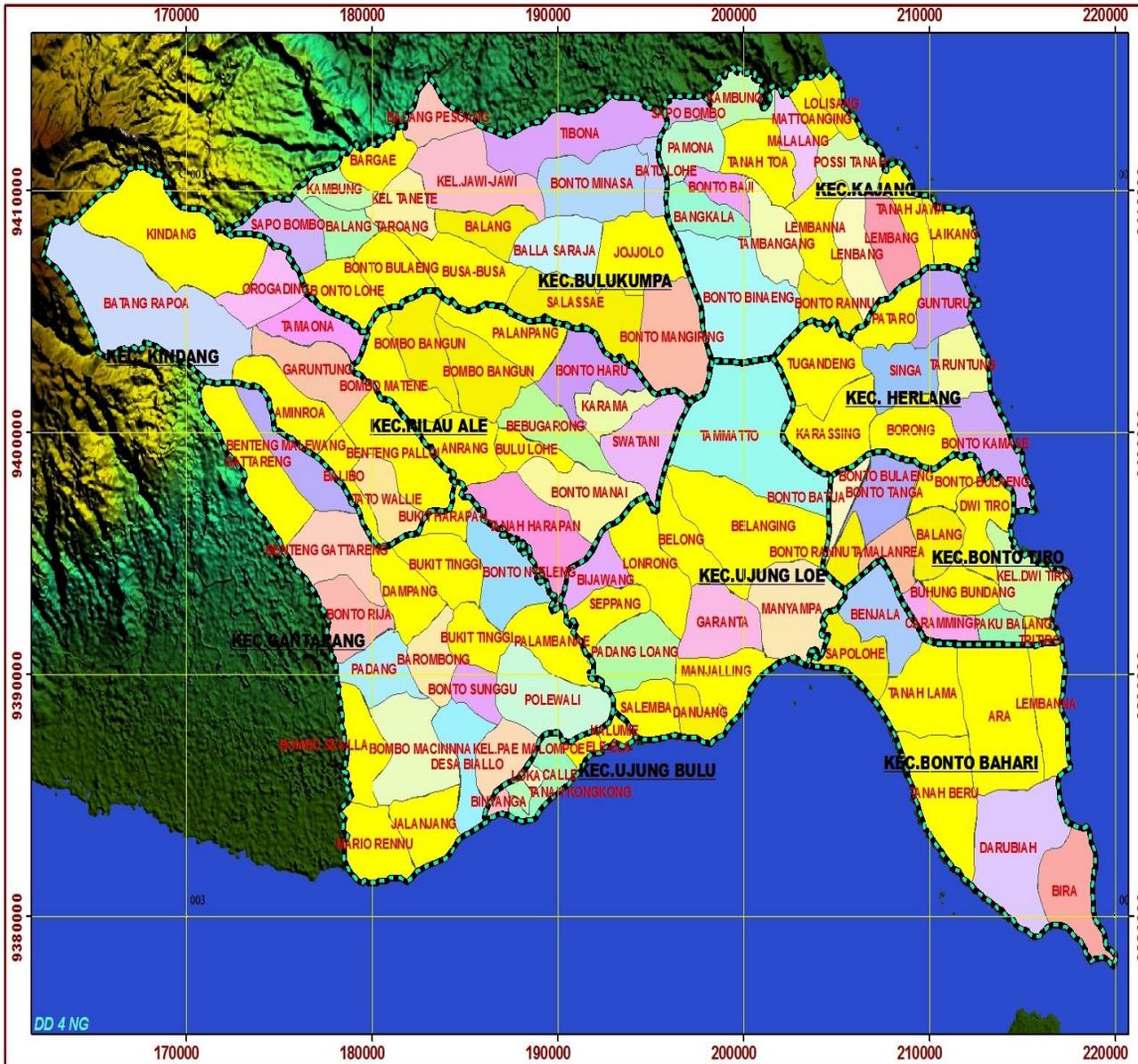
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Rosda Karya, Bandung. Nazir, Moch.1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Partisipasi Masyarakat Penghasilan Rendah*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Ramly, Nadjamuddin. 2005. *Membangun Lingkungan Hidup Yang Harmoni dan Berperadaban*. Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta.
- Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). *Community Organization: theory, principles and practice*. Second Edition. NewYork: Harper & Row Publishers.
- Rukmana, Nana, Steinberg, Florian dan Robert Van Der Hoff. 1993. *Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Rudinelli, Y. 1996. *Community Based Management di Wilayah Pesisir. Pelatihan Perencanaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Lautan. Institut Pertanian Bogor.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Non Profit*. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Sanoff, Henry. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. John Willey & Sons Inc. USA.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Schubeler, Peter. 1996. *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*. The World Bank. Washington DC.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

- Soehendy, Joesoef. 1997. *Peran Serta Masyarakat Dalam Program Pengembangan Lahan Terkendali di Kawasan Pinggiran Kota Bandung*. Program Magister PWK, Program Pasca Sarjana ITB.
- Sudarmadji. 2001. *Rehabilitasi Hutan Mangrove dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. *Jurnal Ilmu Dasar*. Vol. 2 No.2. 68 -71.
- Sugiarto, dkk. 2001. *Teknik Sampling*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sulaiman, Halil. 1985. *Peran Serta Masyarakat*. Penerbit STKS. Bandung.
- Soemarwoto, O. 1997. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumampouw, Monique. (2004). "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacob Rais, *et al.* *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.
- Susanto, Astrid. 1999. *Pengantar Sosiologi Perubahan Sosial*. CV.Putra Bardin. Jakarta.
- Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: Penerbit: PT. Gramedia.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Suripin. 2002. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____, 2004. *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- WALHI. 1993. *Bumi Wahana: Strategi Menuju Kehidupan Yang Berkelanjutan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Wardhana, W.A. 2001. Dampak pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.

Yudohusodo, Siswono dkk. 1991. *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Penerbit Yayasan Padamu Negeri. Jakarta.





**PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

1:150,000

Ket

- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- LAUT
- LOKASI SASARAN PROGRAM

PAMSIMAS

SUMBER : 1.Peta RBI Tahun 2000
2.Peta Administrasi Desa Dalam PDP3D Kab. Bulukumba2003
WGS_1984_UTM_Zone_51S
Projection: Transverse Mercator
Central Meridian: 10.000m

BULUKUMBA

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
2006**

FOTO KEGIATAN PAMSIMAS KEL.SAPOLOHE T.A 2011

	<p>Lokasi : Kel.Sapolohe</p>
	<p>Kegiatan : Sumber Air Minum</p>
	<p>Dokumentasi: LKM Pemuda Kreatif</p>
	<p>Lokasi : Kel.Sapolohe</p>
	<p>Kegiatan : Reservoir</p>
	<p>Dokumentasi: LKM Pemuda Kreatif</p>
	<p>Lokasi : Kel.Sapolohe</p>
	<p>Kegiatan : Bak Penyaringan Sumber Air Minumdan Mesin Gardu</p>
	<p>Dokumentasi: LKM Pemuda Kreatif</p>

FOTO KEGIATAN PAMSIMAS KEL.SAPOLOHE T.A 2011

	Lokasi : Kel.Sapolohe
	Kegiatan : Pemasangan Pipa Transmisi
	Dokumentasi: LKM Pemuda Kreatif
 <p>20/11/2010</p>	Lokasi : Kel.Sapolohe
	Kegiatan : Pemasangan Pipa Distribusi
	Dokumentasi: LKM Pemuda Kreatif

FOTO KEGIATAN PAMSIMAS DESA MATTOANGING T.A 2010

	<p>Lokasi : Desa Mattoanging</p>
	<p>Kegiatan : Sumber Air Minum</p>
	<p>Dokumentasi: LKM Sandro Kajang</p>
	<p>Lokasi : Desa Mattoanging</p>
	<p>Kegiatan : Reservoir</p>
	<p>Dokumentasi: LKM Sandro Kajang</p>
	<p>Lokasi : Desa Mattoanging</p>
	<p>Kegiatan : Pemasangan Pipa Distribusi</p>
	<p>Dokumentasi: LKM Sandro Kajang</p>